

**PT Vale Indonesia Tbk  
dan entitas anaknya/  
*and its subsidiaries***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/  
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 Desember 2019 dan 2018/  
*December 31, 2019 and 2018***

**PT Vale Indonesia Tbk**  
**dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**Daftar isi/Contents**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi/*Directors' Statement of Responsibility*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:/  
*Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and 2018:*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i> .....	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i> .....	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i> .....	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i> .....	6-57



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS  
TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**THE DIRECTORS' STATEMENT  
OF THE RESPONSIBILITY FOR THE  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

**PT VALE INDONESIA Tbk  
dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

Atas nama Direksi, kami, yang bertanda tangan  
di bawah ini:

*On behalf of the Board of Directors,  
we, the undersigned:*

- |    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Nama                            | Nicolas D. Kanter   | Name  |
|    | Alamat Kantor                   | The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta 12190 | Office Address                                |
|    | Alamat Domisili<br>(sesuai KTP) | Jl. Cikatomas II No. 5<br>Kebayoran Baru, Jakarta Selatan                                   | Address of Domicile<br>(as per Identity Card) |
|    | Telepon Kantor                  | +62 21 524 9002/524 9000  | Office Telephone                              |
|    | Jabatan                         | Presiden Direktur/President Director  | Position                                      |
| 2. | Nama                            | Bernardus Irmanto   | Name  |
|    | Alamat Kantor                   | The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta 12190 | Office Address                                |
|    | Alamat Domisili<br>(sesuai KTP) | Jl. Cilandak I No. 30 Kav. 17<br>Cilandak Barat<br>Jakarta Selatan                          | Address of Domicile<br>(as per Identity Card) |
|    | Telepon Kantor                  | +62 21 524 9002/524 9000  | Office Telephone                              |
|    | Jabatan                         | Direktur/Director   | Position                                      |

menyatakan bahwa:

*declare that:*

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup");  | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company") and its subsidiaries (together the "Group");</i>  |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  | 2. | <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>  |
| 3. | a. Pengungkapan yang telah kami buat dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah lengkap dan akurat;<br>b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup; | 3. | a. <i>The disclosures we have made in the Group's consolidated financial statements are complete and accurate;</i><br>b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Group's consolidated financial statements;</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Grup.   | 4. | <i>We are responsible for the Group's internal control.</i>  |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi

*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 20 Februari 2020/February 20, 2020

Presiden Direktur/President Director

Direktur/Director





(Nicolas D. Kanter) (Bernardus Irmanto)



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT VALE INDONESIA Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Management's responsibility for the consolidated financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00096/2.1025/AU.1/02/0226-1/1/II/2020





Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Vale Indonesia Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

JAKARTA

20 Februari/February 2020

**Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA**

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0226

**PT Vale Indonesia Tbk**  
**dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	249,035	301,153	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	-	15,607	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	7	107,295	124,248	- Related parties
Persediaan	9	147,961	131,779	Inventories
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		6,988	9,250	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		71,172	41,548	- Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10	3,108	4,887	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	8	2,754	2,526	Other current financial assets
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>588,313</b>	<b>630,998</b>	<b>Total current assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	15,412	14,345	Restricted cash
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		29,146	-	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		117,674	116,281	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	33e	58	18	- Related parties
Aset tetap	11, 12	1,467,462	1,434,510	Fixed assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	8	4,623	6,300	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b>1,634,375</b>	<b>1,571,454</b>	<b>Total non-current assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,222,688</b>	<b>2,202,452</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Vale Indonesia Tbk**  
**dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	13			Trade payables
- Pihak-pihak berelasi		<b>2,071</b>	1,620	- Related parties
- Pihak ketiga		<b>95,337</b>	89,561	- Third parties
Akrual	15	<b>16,327</b>	25,599	Accruals
Liabilitas imbalan kerja				Short-term employee benefit
jangka pendek	17	<b>15,563</b>	15,823	liabilities
Utang pajak	14b			Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		-	1,119	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		<b>1,774</b>	1,781	- Other taxes
Bagian jangka pendek atas				Current portion of long-term
pinjaman bank jangka panjang	18	-	36,519	bank borrowings
Liabilitas sewa	11	<b>947</b>	-	Lease liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis				Share-based payment
saham		<b>780</b>	2,042	liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek				Other current financial
lainnya	16	<b>3,753</b>	1,276	liabilities
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b>136,552</b>	175,340	<b>Total current liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan pascakerja				Long-term post-employment
jangka panjang	19	<b>19,419</b>	14,878	benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	14d	<b>80,490</b>	90,674	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	11	<b>173</b>	-	Lease liabilities
Provisi atas penghentian				Provision for asset
pengoperasian aset	28	<b>44,361</b>	37,833	retirement
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>		<b>144,443</b>	143,385	<b>Total non-current liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>280,995</b>	318,725	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham				Share capital
- Modal dasar -				- Authorised capital -
39.745.354.880 saham dengan				39,745,354,880 shares with
nilai nominal IDR25				par value IDR25
(nilai penuh) per saham				(full amount) per share
pada 31 Desember 2019				as at December 31, 2019
dan 2018				and 2018
- Modal ditempatkan dan disetor				- Issued and fully paid capital -
penuh - 9.936.338.720 saham				9,936,338,720 shares as at
pada 31 Desember 2019				December 31, 2019 and
dan 2018	20	<b>136,413</b>	136,413	2018
Tambahan modal disetor	22	<b>277,760</b>	277,760	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan	23	<b>27,283</b>	27,283	- Appropriated
- Belum dicadangkan		<b>1,500,237</b>	1,442,271	- Unappropriated
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1,941,693</b>	1,883,727	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>2,222,688</b>	2,202,452	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Vale Indonesia Tbk**  
**dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan	33a	<b>782,012</b>	776,900	Revenue
Beban pokok pendapatan	24	<b>(665,558)</b>	(672,899)	Cost of revenue
<b>LABA BRUTO</b>		<b>116,454</b>	104,001	<b>GROSS PROFIT</b>
Pendapatan lainnya	26	<b>3,266</b>	7,615	Other income
Beban usaha	25	<b>(13,730)</b>	(11,578)	Operating expenses
Beban lainnya	27	<b>(17,701)</b>	(15,184)	Other expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>88,289</b>	84,854	<b>OPERATING PROFIT</b>
Pendapatan keuangan		<b>4,759</b>	4,552	Finance income
Biaya keuangan	34	<b>(3,912)</b>	(6,789)	Finance costs
<b>PENDAPATAN/(BIAYA) KEUANGAN, BERSIH</b>		<b>847</b>	(2,237)	<b>NET FINANCE INCOME/(COSTS)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>89,136</b>	82,617	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan	14c	<b>(31,736)</b>	(22,105)	Income tax expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>57,400</b>	60,512	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	19	<b>755</b>	5,131	- Changes resulting from actuarial remeasurement of post-employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	14d	<b>(189)</b>	(1,283)	- Income tax on other comprehensive income
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>566</b>	3,848	<b>TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>57,966</b>	64,360	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>				<b>EARNINGS PER SHARE</b>
- Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	31	<b>0.0058</b>	0.0061	- Basic and diluted (in full amount of US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT Vale Indonesia Tbk**  
dan entitas anaknyaland its subsidiaries

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital</u>	<u>Saldo laba/Retained earnings</u>		<u>Total ekuitas/ Total equity</u>
	<u>Dicadangkan/ Appropriated</u>	<u>Belum dicadangkan/ Unappropriated</u>			
<b>Saldo 1 Januari 2018</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>27,283</b>	<b>1,377,911</b>	<b>1,819,367</b>
<b>Laba komprehensif 2018</b>					
Laba	-	-	-	60,512	60,512
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	3,848	3,848
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>27,283</b>	<b>1,442,271</b>	<b>1,883,727</b>
<b>Laba komprehensif 2019</b>					
Laba	-	-	-	57,400	57,400
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	566	566
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>27,283</b>	<b>1,500,237</b>	<b>1,941,693</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Vale Indonesia Tbk**  
**dan entitas anaknya/and its subsidiaries**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		<b>798,965</b>	818,229	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok		<b>(441,062)</b>	(417,047)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan		<b>(70,616)</b>	(36,348)	Payments of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya		<b>(50,899)</b>	(59,927)	Payments of other taxes
Penerimaan restitusi pajak		<b>23,808</b>	23,224	Receipts of tax refunds
Pembayaran ke karyawan		<b>(86,216)</b>	(92,342)	Payments to employees
Penempatan jaminan keuangan		<b>(14,486)</b>	(128)	Placement of financial guarantee
Penarikan jaminan keuangan		<b>13,419</b>	128	Withdrawal of financial guarantee
Penerimaan pendapatan keuangan		<b>4,759</b>	4,552	Receipts of finance income
Pembayaran royalti dan retribusi		<b>(39,678)</b>	(35,982)	Payments of royalties and levies
<b>Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi</b>		<b>137,994</b>	204,359	<b>Net cash flows provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembayaran untuk pembelian aset tetap		<b>(166,560)</b>	(83,784)	Payments for acquisition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap		<b>456</b>	-	Proceeds from disposal of fixed assets
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(166,104)</b>	(83,784)	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	6	<b>(3,902)</b>	(39,394)	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	6	<b>19,509</b>	39,677	Withdrawal of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	18	<b>(37,500)</b>	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Pembayaran liabilitas sewa		<b>(1,245)</b>	-	Payments of lease liabilities
Pembayaran beban keuangan		<b>(1,253)</b>	(3,212)	Payments of finance costs
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b>(24,391)</b>	(40,429)	<b>Net cash flows used in financing activities</b>
<b>(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas</b>		<b>(52,501)</b>	80,146	<b>Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		<b>301,153</b>	221,699	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>		<b>383</b>	(692)	<b>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<b>249,035</b>	301,153	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

## 1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan akta No. 37 tanggal 13 September 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 4 April 2018 dan RUPSLB pada tanggal 16 Agustus 2019. Perubahan dalam akta No.121 tanggal 29 Juni 2015 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan perubahan dalam akta No. 14 tanggal 4 April 2018 dan No. 37 tanggal 13 September 2019 masing-masing telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0135774 tanggal 5 April 2018 dan Surat Keputusan No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited ("VCL") dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Gedung The Energy, Lt. 31, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Hak Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi didasarkan atas Kontrak Karya ("KK") yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang kemudian diubah dan diperpanjang pada 15 Januari 1996, dan terakhir diamendemen pada 17 Oktober 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Berdasarkan ketentuan KK 2014, KK Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan (lihat Catatan 39d mengenai komitmen investasi Perseroan).

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya untuk aset tetap PLTA dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar untuk aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham biasa atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

## 1. General

PT Vale Indonesia Tbk, (the "Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary of Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendments made by deed No. 121, dated June 29, 2015, deed No. 14, dated April 4, 2018, and deed No. 37, dated September 13, 2019, all drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary of Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015, in the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on April 4, 2018 and in the EGMS on August 16, 2019, respectively. The amendment in deed No. 121, dated June 29, 2015 was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015, while the amendment in deeds No. 14 dated April 4, 2018 and No. 37 dated September 13, 2019, each has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0135774 dated April 5, 2018 and decision letter No. AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019 dated October 9, 2019, respectively.

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited ("VCL") and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in The Energy Building, 31<sup>st</sup> floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

The Company's right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi was granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 entered into between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and the Company, which was modified and extended on January 15, 1996, and was later amended on October 17, 2014 as required by the 2009 Mining Law ("the 2014 CoW").

Under the terms of the 2014 CoW, the Company's CoW is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of a business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

Furthermore, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritise domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy (refer to Note 39d about the Company's investment commitments).

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been received to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value for hydroelectric fixed assets and lower of cost or market price for other assets, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on a formula stated in the Governmental Decree of 1975.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million ordinary shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

**1. Umum (lanjutan)**

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

Perseroan mengadakan RUPST pada 2 April 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Lovro Paulic sebagai Direktur. Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi dan Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2021.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Robert Alan Morris sebagai Komisaris. Dengan demikian pemegang saham menyetujui pengangkatan Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2020.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri") No. 48 Tahun 2017 tentang Penguasaan dan Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST 2019 dan RUPSLB 2018 sebagaimana dibuktikan Surat Menteri No. 272/30/MEM.B/2019 tertanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Selanjutnya Perseroan mengadakan RUPSLB pada 16 Agustus 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Eduardo Bartolomeo sebagai Presiden Komisaris. Dengan demikian, pemegang saham menyetujui pengangkatan Mark James Travers sebagai Presiden Komisaris, Mahendra Siregar sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Cory McPhee sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2020. Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut juga telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dibuktikan Surat Menteri No. 415/30/MEM.B/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

Mahendra Siregar menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan kepada Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada 25 Oktober 2019.

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris akan terdiri dari 5 Komisaris dengan 1 Komisaris Independen, hingga RUPST menerima pengunduran diri Mahendra Siregar dan menunjuk Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahendra Siregar tersebut.

Terkait dengan susunan Komite Audit, masa jabatan kedua Dedi Rudaedi dan masa jabatan Annie Margono sebagai anggota Komite Audit, masing-masing berakhir pada tanggal 2 April 2019 dan 13 November 2019. Dedi Rudaedi pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2015, sedangkan Annie Margono pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tahun 2017. Selanjutnya, Mahendra Siregar menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komite Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada 25 Oktober 2019.

Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Herwan Ng sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

**1. General (continued)**

At the EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's ordinary shares. This became effective on August 3, 2004.

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

The Company held an AGMS on April 2, 2019, which approved among others, the resignation of Lovro Paulic as Director. Taking into consideration the needs of the Company and effectiveness in the decision making process, the shareholders approved the appointment of Febriany Eddy as Vice President Director, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi and Vinicius Mendes Ferreira, each as Director, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2021.

With regards to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Luiz Fernando Landeiro as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2020.

The Company has complied with the Minister of Energy and Mineral Resources (the "Minister") Regulation No. 48 Year 2017 on the Supervision of the Implementation of Business Activities in the Field of Energy and Mineral Resources with respect to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the shareholders at the 2019 AGMS and 2018 EGMS, as evidenced by the Minister's Letter No. 272/30/MEM.B/2019 dated July 11, 2019 on the Approval to the Change of the Directors and/or Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.

Further, the Company held an EGMS on August 16, 2019, which approved among others, the resignation of Eduardo Bartolomeo as President Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Mark James Travers as President Commissioner, Mahendra Siregar as Vice President Commissioner and Cory McPhee as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 EGMS until the closing of the AGMS in 2020. The changes in the Board of Commissioners composition has obtained approval from the Minister, as evidenced by the Minister's Letter No. 415/30/MEM.B/2019 dated October 7, 2019 on the Approval to the Change of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.

Mahendra Siregar tendered his resignation as Vice President Commissioner and Independent Commissioner to the Board of Directors of the Company, effective on October 25, 2019.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is composed of 5 Commissioners with 1 Independent Commissioner until the AGMS accepts Mahendra Siregar's resignation and appoints a new Vice President Commissioner and Independent Commissioner to fill the vacancy left by Mahendra Siregar.

With regards to composition of the Audit Committee, the second term of Dedi Rudaedi and the term of Annie Margono as members of the Audit Committee has expired on April 2, 2019 and November 13, 2019, respectively. Dedi Rudaedi was first appointed as a member of the Audit Committee in 2015, while Annie Margono was first appointed as a member of the Audit Committee in 2017. Further, Mahendra Siregar tendered his resignation as Chair of the Audit Committee to the Board of Commissioners of the Company, effective on October 25, 2019.

The Board of Commissioners of the Company has appointed Herwan Ng as the new member of the Audit Committee effective from May 1, 2019 until April 30, 2021.

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2019 dan 2018, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

As at December 31, 2019 and 2018, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
Presiden Komisaris	<b>Mark James Travers</b>	Eduardo Bartolomeo	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	-	Mark James Travers	Vice President Commissioner
Komisaris	<b>Luiz Fernando Landeiro Cory McPhee Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *)</b>	Robert Alan Morris Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	-**)	Mahendra Siregar	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	<b>Herwan Ng**)</b>	Dedi Rudaedi Annie Margono	Audit Committee Members
Presiden Direktur	<b>Nicolas D. Kanter</b>	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	<b>Febriany Eddy</b>	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	<b>Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira</b>	Febriany Eddy Lovro Paulic	Directors

\*) Komisaris Independen

\*) Independent Commissioners

\*\*\*) Anggota Audit Komite tambahan telah ditunjuk setelah akhir tahun 2019 (Catatan 42)

\*\*) Additional Audit Committee member has been appointed subsequent to 2019 year end (Note 42)

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2019, entitas anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As at December 31, 2019, subsidiaries directly owned by the Company were as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Total aset (sebelum dieliminasi)/ Total assets (before elimination)	
		2019	2018	2019 AS\$/US\$'000	2018 AS\$/US\$'000
PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-
PT Kolaka Nickel Indonesia	Indonesia	99.9%	-	720	-

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia ("entitas anak"), yang masing-masing 99,9% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0,1% saham dimiliki oleh VCL. Total modal ditempatkan dan disetor pada masing-masing entitas anak adalah sebesar IDR10 miliar (nilai penuh). Perseroan telah membayarkan porsi modal Perseroan di kedua entitas anak tersebut pada bulan Desember 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, VCL belum membayarkan porsi modal pada kedua entitas anak tersebut. Pembentukan entitas anak tersebut merupakan bagian dari tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan Amandemen KK, dimana Perseroan berkomitmen atas pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel.

On June 25, 2019, the Company has established two subsidiaries, namely PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia and PT Kolaka Nickel Indonesia ("subsidiaries"), each of which has 99.9% of its shares owned by the Company and 0.1% by VCL. The total capital issued and paid for in each of the subsidiaries is IDR10 billion (full amount). The Company has paid up its capital in these subsidiaries in December 2019. Up to December 31, 2019, VCL has not yet paid up its capital. The establishment of the subsidiaries is intended as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces based on the CoW Amendment, under which the Company is committed to the construction of nickel ore processing facilities.

Jumlah seluruh karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 3.044 (31 December 2018: 3.092) (tidak diaudit).

The total number of employees of the Group as at December 31, 2019 was 3,044 (December 31, 2018: 3,092) (unaudited).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

2. Summary of significant accounting policies

Ikhtisar kebijakan akuntansi Grup yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan konsolidasian terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang tercakup oleh laporan keuangan ini konsolidasian, kecuali yang dinyatakan dalam Catatan 3. Laporan keuangan konsolidasian Grup diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 20 Februari 2020.

The following summary of the significant accounting policies of the Group is presented to assist the reader in evaluating the accompanying consolidated financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the years covered in the consolidated financial statements, except as stated in Note 3. The Group's consolidated financial statements were authorised by the Board of Directors on February 20, 2020.

2.1. Penyajian laporan keuangan

2.1. Presentation of financial statements

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh KK dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.



## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.2. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

### 2.3. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

### 2.4. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan dalam Catatan 4.

### 2.5. Prinsip-prinsip konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban antar entitas Grup dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar entitas Grup yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

### 2.6. Mata uang fungsional, penyajian dan penjabaran mata uang

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas Grup beroperasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir tahun. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laba rugi.

### 2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.2. Statement of compliance

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA").

### 2.3. Basis of measurement

The consolidated financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

### 2.4. Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

### 2.5. Principles of consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS").

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

### 2.6. Functional and presentation currency and currency translation

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group entities operate.

At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at year-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognised at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

### 2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

### 2.8. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan dapat mengalami penurunan nilai.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

### 2.9. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode rata-rata tertimbang dari biaya perolehan. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya pengupasan tanah, menambang, bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu, tenaga kerja, penyusutan serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

### 2.10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Uang muka adalah pembayaran di muka yang dilakukan Grup kepada pemasok. Uang muka dibebankan secara proporsional pada laba rugi sesuai dengan kemajuan dari pembelian barang dan jasa dan kesepakatan dengan pemasok.

### 2.11. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Biaya pengupasan pasca produksi dimasukkan dalam biaya persediaan, kecuali ketika sebuah proyek baru dikembangkan untuk mendapatkan akses ke cadangan bijih nikel yang signifikan. Dalam hal tersebut, biaya dikapitalisasi dan diamortisasi selama ekstraksi bijih nikel, selama masa manfaat cadangan nikel. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada biaya pengupasan yang dikapitalisasi oleh Grup.

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Grup dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash (continued)

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

### 2.8. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel matte sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, and they are subject to impairment.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Group.

### 2.9. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using a weighted average cost method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realisable value.

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Cost of finished goods and work in progress comprises stripping, mining, raw materials, fuels, supplies, labor, depreciation and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

### 2.10. Prepayments and advances

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances are payments made in advance by the Group to its vendors. Advances are charged to profit or loss based on progress of goods and services purchase and agreements with suppliers.

### 2.11. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

Post-production stripping costs are included in the cost of inventory, except when a new project is developed to permit access to a significant nickel ore reserve. In such cases, the cost is capitalised and amortised during the extraction of the nickel ore, over the useful life of the ore reserve. As at December 31, 2019 and 2018, there were no stripping costs capitalised by the Group.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.12. Aset tetap dalam penyelesaian

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai.

Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

### 2.13. Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya KK (d disesuaikan dengan asumsi perpanjangan) yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan PLTA yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	4 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

Grup memperkirakan nilai sisa aset tetap diatas adalah nihil.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

Grup mengalokasi komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

### 2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas (jika ada) - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.12. Construction in progress

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in profit or loss.

Exploration costs are expensed as incurred.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans used in financing construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.

For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

### 2.13. Depreciation and amortisation

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW (adjusted for assumed extensions). An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these consolidated financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	4 - 30
Furniture and office equipment	5

The Group has estimated the residual value of the above fixed assets at nil.

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.

The Group allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortisation of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using the straight-line method.

### 2.14. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life (if any) - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan (lanjutan)

### 2.14. Impairment of non-financial assets (continued)

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss.

### 2.15. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

### 2.15. Environmental expenditures

Pengeluaran - pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme bank garansi, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 39b). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred or capitalised and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 39b). In addition, a provision for asset retirement has been recognised for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan atau penghapusan dengan cara lainnya.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisions for asset retirement are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a risk-free rate. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognised as finance costs.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Grup akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Grup mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Group accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Group applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

### 2.16. Pengakuan pendapatan dan beban

### 2.16. Revenue and expense recognition

Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Penjualan diakui sebagai pendapatan ketika pengendalian atas produk ditransfer ke pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup untuk ditukar dengan produk tersebut. Berdasarkan kontrak penjualan, pendapatan diakui ketika produk dimuat ke kapal pelanggan di pelabuhan muat.

Sales represent revenue earned from the sale of products. Sales are recognised as revenue when the control of the product transfers to customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those products. Based on the sales contracts, revenue is recognised when the product is loaded on to the customer vessel at the loading port.

Pendapatan diakui berdasarkan harga yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan pembayaran kontrak, periode antara transfer produk ke pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan kurang dari satu tahun. Ketentuan pembayaran tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan dan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Revenue is recognised based on the price specified in the contracts with the customer. Based on the contract payment terms, the period between the transfer of the products to the customer and payment by the customer is less than one year. The payment terms do not have a significant financing component and were not changed from previous years.

Beban (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya eksplorasi dan pengupasan tanah) diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

Expenses (including but not limited to exploration and stripping costs) are recognised as incurred on an accrual basis.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.17. Pajak penghasilan

Manfaat/(beban) pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan badan kini dan tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan atau kerugian komprehensif lain.

Pajak kini merupakan pajak terutang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan kena pajak atau rugi pajak tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada saat tanggal pelaporan, dan mencakup penyesuaian tahun sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak. Liabilitas pajak kini atau piutang pajak diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang terkait dengan kompleksitas atas peraturan-peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak tangguhan tidak diakui jika timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi sejauh manfaat pajak terkait tidak lagi memungkinkan untuk terealisasi; pengurangan tersebut dilakukan pembalikan ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan meningkat.

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tangguhan, Grup memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

### 2.18. Liabilitas imbalan kerja

#### a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharapkan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diakui seolah-olah sebagai program manfaat pasti.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.17. Income taxes

Income tax benefit/(expense) is comprised of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income or loss.

Current tax is the expected tax payable or refundable on the taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

In determining the amount of current and deferred tax, the Group considers the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Management periodically evaluates the position taken in Annual Tax Return with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

### 2.18. Employment benefit liabilities

#### a. Pension and Labor Law benefits

The Company has maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount. For financial reporting purposes, the defined contribution plan is therefore effectively treated as if it were a defined benefit plan.



## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

#### a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan (lanjutan)

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, bersama dengan pengembalian investasi yang dihasilkan dari iuran, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, akun liabilitas imbalan pascakerja.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setidaknya setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (karena tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laba rugi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada posisi keuangan konsolidasian.

Saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi.

#### b. Imbalan kesehatan pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun dan memiliki hak atas fasilitas ini. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setidaknya setiap tahun oleh aktuaris yang berkualifikasi. Pada tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

Pada tahun 2016, Perseroan berhenti menggunakan program asuransi karena peningkatan jumlah premi. Perseroan kemudian menerapkan sebuah pendekatan Layanan Administrasi Saja (pendekatan "ASO") dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu administrasi program ini. Pada pendekatan ini, Perseroan menempatkan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak ketiga untuk menutupi biaya medis bagi peserta program. Pihak ketiga menerapkan pendekatan Koordinasi Imbalan ("COB") yang memungkinkan klaim medis dipertimbangkan dalam perhitungan biaya keseluruhan.

#### c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.18. Employment benefit liabilities (continued)

#### a. Pension and Labor Law benefits (continued)

The Company recognises the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, together with investment returns arising from the contributions, as a liability in the consolidated statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated at least annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefits expense in profit or loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statements of changes in equity and financial position.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss.

#### b. Post-retirement medical benefits

The Company provides post-retirement medical benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified actuary values this liability at least annually. In 2014, the Company changed its method to fund this program through an insurance program.

In 2016, the Company stopped using an insurance program due to escalating premiums. The Company subsequently implemented an Administrative Service Only approach ("ASO" approach) by engaging a third party appointed by the Company to help administer the program. In this approach, the Company places a certain amount of money to be administered by a third party to cover the medical costs for the program participants. The third party applies the Coordination of Benefit ("COB") approach which allows the medical claim to be considered in the overall cost calculation.

#### c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Company recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits. Termination benefits payable more than 12 months after the reporting date are discounted to reflect present value.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

#### d. Program bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan.

#### e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan program imbalan setara saham dan kinerja unit saham ("PSU") kepada karyawan tertentu ("peserta"). Untuk imbalan setara saham, peserta dapat membeli saham Vale S.A. tanpa ada manfaat yang diberikan oleh karyawan tertentu. Jika saham yang dibeli ditahan selama periode tiga tahun dan peserta masih merupakan karyawan Perseroan, maka peserta berhak mendapatkan dari Perseroan imbalan saham setara dengan jumlah saham yang dibeli oleh peserta.

Untuk program PSU, selama periode empat tahun *vesting cycle* peserta berhak menerima imbalan setara dengan nilai pasar saham biasa Vale S.A. berdasarkan faktor kinerja yang diukur sebagai indikator tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Imbalan ini dibayarkan secara kas dan dapat berupa pembayaran cicilan, tergantung faktor kinerja setiap tahunnya.

### 2.19. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2019, Grup telah menerapkan PSAK 73 - Sewa menggunakan pendekatan cara praktis sehingga informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 30.

#### Diterapkan sebelum 1 Januari 2019

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laba rugi selama periode sewa.

#### Diterapkan sejak 1 Januari 2019

Pada tanggal dimulainya kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substantial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan;
- Grup memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset.

Pada tanggal dimulainya kontrak atau pada saat penilaian kembali kontrak yang mengandung sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap unsur sewa berdasarkan harga relatif dari unsur sewa.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal awal sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya, yang terdiri dari nilai awal dari liabilitas sewa yang disesuaikan dengan setiap pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulai, ditambah dengan biaya langsung yang terjadi dan perkiraan biaya untuk membongkar dan melepas aset terkait atau untuk merestorasi area dimana aset tersebut ditempatkan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Kewajiban sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tidak dibayar pada awal kontrak, didiskontokan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimulainya hingga akhir masa manfaat dari aset hak-guna atau akhir dari masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dinilai untuk penurunan nilai dan disesuaikan atas pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan suatu indeks atau tingkat, jika ada perubahan dalam estimasi Grup dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan melakukan opsi pembelian, perpanjangan atau pemutusan kontrak. Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara tersebut, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah tercatat dari aset hak-guna, atau diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat dari aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.18. Employment benefit liabilities (continued)

#### d. Bonus plans

The Company recognises a liability and an expense for bonuses based on the applicable formula which consider various aspects of the Company's performance.

#### e. Share-based payments

The Company awards eligible employees ("participants") participation in a share matching program and performance share units ("PSU") program. For the share matching program, the participants can acquire Vale S.A.'s shares without any benefits being provided by the eligible employee. If the shares acquired are held for a period of three years and the participants keep an employment relationship with the Company, the participant is entitled to receive from the Company an award in shares, equivalent to the number of shares originally acquired by the participants.

For the PSU program, the participants have the opportunity to receive during a four year-vesting cycle, an award equivalent to the market value of a determined number of common shares and conditioned to Vale S.A.'s performance factor measured as an indicator of total return to the shareholders ("TSR"). This award is paid in cash and can occur in cumulative installments, conditioned to the performance factor of each year.

### 2.19. Leases

On January 1, 2019, the Group has applied SFAS 73 - Leases using the simplified approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under SFAS 30.

#### Policy prior to January 1, 2019

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss over the term of the lease.

#### Policy starting January 1, 2019

At the inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.19. Sewa

Grup menyajikan aset hak-guna yang tidak memenuhi definisi properti investasi sebagai aset tetap dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset yang bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa ini sebagai beban menggunakan basis garis lurus selama masa sewa.

### 2.20. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusi dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Grup.

### 2.21. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional (Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup) untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

### 2.22. Instrumen keuangan

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Grup kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

#### Aset keuangan

##### Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Grup menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

Grup menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal dan tidak dapat merubah klasifikasi yang ditentukan saat penerapan awal tersebut.

Seluruh aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali dalam hal aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi atas aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan dalam laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.19. Leases

The Group presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property as fixed assets and lease liabilities in the consolidated statements of financial position.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

### 2.20. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of any dilutive potential ordinary shares owned by the Group.

### 2.21. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker (the Directors are the Group's chief operating decision maker) to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

### 2.22. Financial instruments

A financial instrument is recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognised when the Group's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Group's obligations expire or are discharged or cancelled.

#### Financial assets

##### Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Group assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI").

Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortised cost.
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL").
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification made at initial adoption.

All financial assets are recognised initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.22. Instrumen keuangan (lanjutan)

#### Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan lancar lainnya, piutang non-usaha dari pihak berelasi dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang ditahan hingga pengembalian arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga, dan tidak didesain untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur dengan biaya diamortisasi. Nilai tercatat aset tersebut disesuaikan dengan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") yang diakui dan diukur. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam 'pendapatan keuangan dan pendapatan lainnya' menggunakan metode suku bunga efektif.

#### Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

### 2.23. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui ECL untuk semua aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan pada perkiraan tingkat bunga efektif awal.

ECL diakui dalam tiga tahap ("*general model*") untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal. Untuk eksposur kredit di mana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL ditentukan untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit di mana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diharapkan selama sisa waktu eksposur risiko kredit, terlepas dari waktu peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur). Untuk aset keuangan yang terdapat bukti obyektif penurunan nilai, ECL sepanjang umur dihitung pada nilai tercatat bersih (setelah dikurangi penyisihan kredit).

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika mengestimasi ECL, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang mendukung dan relevan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan informasi penilaian kredit dan termasuk informasi *forward-looking*.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.22. Financial instruments (continued)

#### Financial assets (continued)

The Group's financial assets measured at amortised cost include cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current financial assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current assets.

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent SPPI, and that are not designated at FVTPL, are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit losses ("ECLs") allowance recognised and measured. Interest income from these financial assets is included in 'finance income and other income' using the effective interest rate method.

#### Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost. As at December 31, 2019 and 2018, the Group only has financial liabilities measured at amortised cost.

Amortised cost is measured by discounting the liability amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest rate method are recognised in profit or loss.

Trade payables, accruals, other current financial liabilities and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability is settled simultaneously.

### 2.23. Impairment of financial assets

The Group recognises an allowance for ECLs for all the Group's financial assets measured at amortised cost. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate.

ECLs are recognised in three stages ("*general model*") for impairment based on changes in credit quality since initial recognition. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (12-months ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (lifetime ECL). For financial assets that have objective evidence of impairment, lifetime ECL is calculated at the net carrying amount (net of credit allowance).

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group compares the risk of a default occurring on the financial assets as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial assets as at the date of initial recognition and considers supportable and reasonable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.23. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup mempertimbangkan bahwa piutang usaha memiliki risiko kredit rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi peringkat investasi yang dipahami secara global. Grup menganggap ini sebagai BBB- oleh S&P atau BBB lebih tinggi oleh Japan Credit Rating Agency. Ketika peringkat kredit di bawah BBB- oleh S&P atau BBB oleh Japan Credit Rating Agency, Grup menilai apakah peningkatan risiko kredit yang signifikan telah terjadi.

### 2.24. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tahun dimana dividen tersebut diumumkan.

### 2.25. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau *joint venture* yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan di atas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

## 3. Perubahan kebijakan akuntansi

### 3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019

PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) - Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) - Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) - Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) - Pengendalian Bersama
- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja - Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

Grup menerapkan secara dini standar-standar baru yang hanya diwajibkan sejak 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 - Sewa

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.23. Impairment of financial assets (continued)

The Group considers trade receivables to have low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of 'investment grade'. The Group considers this to be BBB- per S&P or BBB or higher per the Japan Credit Rating Agency. When the credit rating is below the BBB- per S&P or BBB per Japan Credit Rating Agency, the Group assesses whether a significant increase in credit risk has occurred.

### 2.24. Dividends

Dividend distributions to the shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated statements of financial position in the year in which the dividends are declared.

### 2.25. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33 to the Consolidated Financial Statements.

## 3. Changes in accounting policies

### 3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2019

The following new/revised SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") have been issued and are effective starting on or after January 1, 2019:

- ISAK 33 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments
- SFAS 22 (2018 Annual Improvement) - Business Combination
- SFAS 26 (2018 Annual Improvement) - Borrowing Costs
- SFAS 46 (2018 Annual Improvement) - Income Taxes
- SFAS 66 (2018 Annual Improvement) - Joint Arrangements
- Amendments to SFAS 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement

The Group early adopted new standards which are only mandatory starting January 1, 2020 as follows:

- SFAS 71 - Financial Instruments
- SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73 - Leases



### 3. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

#### 3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019 (lanjutan)

Standar, revisi dan interpretasi baru yang diadopsi Grup sejak 1 Januari 2019 tidak berdampak material kepada laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali yang dijelaskan di bawah ini:

##### PSAK 71 - Instrumen Keuangan

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Perseroan berdasarkan PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan tersebut memenuhi kriteria PSAK 71 untuk klasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, karena instrumen keuangan ini dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan kas, yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk model penurunan nilai, Grup telah menghitung kerugian kredit yang diperkirakan dari aset keuangan dan menentukan bahwa jumlahnya tidak material.

##### PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Standar ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan apakah, berapa banyak dan kapan pendapatan diakui. Standar ini menggantikan PSAK 23 - Pendapatan dan PSAK 34 - Kontrak Konstruksi.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada pendapatan yang sebelumnya diakui dalam PSAK 23 karena Grup hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan dan waktu pengakuan pendapatan berada pada titik yang sama.

##### PSAK 73 - Sewa

Berdasarkan PSAK 73, perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dihapus. Standar ini mensyaratkan penggunaan aset hak-guna dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Ada pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek dan sewa barang bernilai rendah.

Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan cara praktis. Pada saat transisi, liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan pada tingkat bunga pinjaman incremental Grup pada tanggal 1 Januari 2019. Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa di muka atau pembayaran tertunggak. Tidak ada penyesuaian terhadap laba ditahan Grup karena Grup memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. Lihat Catatan 11 untuk informasi mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

#### 3.2. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa PSAK dan ISAK baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif pada 1 Januari 2019, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini:

- ISAK 35 – Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) – Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15: Inventasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Standar baru, amendemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK 112 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Saat dikeluarkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak dari adopsi di masa yang akan datang dari standar terkait, pada posisi keuangan dan hasil operasional konsolidasian Grup.

### 3. Changes in accounting policies (continued)

#### 3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2019 (continued)

The new standards, amendments and interpretations adopted by the Group starting January 1, 2019 have no material impact on the Group's consolidated financial statements, except those discussed below:

##### SFAS 71 - Financial Instruments

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model under SFAS 71 have an immaterial impact to the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognised based on SFAS 55 - Financial Instruments: Recognition and Measurement.

As at December 31, 2019 and 2018, the Group only has financial assets classified as loans and receivables under SFAS 55. Those financial assets meet the SFAS 71 criteria for classification at amortised cost, because these financial instruments are held within a business model whose objective is to collect the cash flows, which represent solely payments of principal and interest.

For the impairment model, the Group has calculated expected credit losses on financial assets and determined that the amount is not material.

##### SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers

This standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. It replaced SFAS 23 - Revenue and SFAS 34 - Construction Contracts.

The adoption of SFAS 72 results in no impact on revenue that was previously recognised under SFAS 23 as the Group has only a single performance obligation and the timing of revenue recognition is at the same point in time.

##### SFAS 73 - Leases

Under SFAS 73, the distinction between operating and finance leases is removed. The standard requires the right-of-use of the leased asset and a financial liability to pay rentals to be recognised. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items.

The Group applies SFAS 73 using the simplified approach. At transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at January 1, 2019. Right-of-use assets are measured at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments. There is no adjustment to the Group's retained earnings as the Group elected to measure the right-of-use assets at an amount equal to the lease liability. Refer to Note 11 for the information regarding impact of SFAS 73 adoption to the Group's consolidated financial statements.

#### 3.2. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

Certain new/revised SFASs and ISAKs have been issued that are not yet effective on January 1, 2019 and have not been applied in preparing these financial statements:

- ISAK 35 – Presentation of Financial Statements for Non-profit Oriented Entities
- SFAS 1 (2019 Annual Improvement) – Presentation of Financial Statements
- Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements
- Amendments to SFAS 15: Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendments to SFAS 62: Insurance Contracts
- SFAS 112: Accounting for Endowments

The above new standards, amendments, annual improvements and interpretations are effective beginning January 1, 2020, except for SFAS 112 which is effective from January 1, 2021.

As of the issuance of these consolidated financial statements, management is evaluating the impact the future adoption of these standards may have on the Group's consolidated financial position and operating results.

#### 4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontingen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus-menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan atas peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan dalam periode mendatang. Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan konsolidasian.

##### 4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Grup. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

##### 4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan (termasuk penelaahan masa periode KK); besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang; dan juga tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui ditinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Pada tahun 2019, Perseroan merubah rencana penambangan dan produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan perubahan estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2041 dan 2056 menjadi antara tahun 2045 dan 2060. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

#### 4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the consolidated financial position reported in future periods. Further details of the nature of these assumptions and conditions can be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

##### 4.1. Reserves estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's consolidated financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortisation charged in profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

##### 4.2. Provision for asset retirement

The Group's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework (including assessment of the period of the CoW); the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities; and also the discount rate. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognised provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2051 to between 2041 and 2056. In 2019, the Company changed its mining and production plan at South and Central Sulawesi areas which resulted in a change in the estimated period of mine closure from between 2041 and 2056 to between 2045 and 2060. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten-year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

#### 4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

##### 4.3. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan Grup. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

##### 4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap tahun pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

##### 4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat bunga diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat kenaikan klaim kesehatan di masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Grup menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah (karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

#### 4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

##### 4.3. Income taxes

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the year in which the determination was made.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

##### 4.4. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, an asset or a cash generating unit is evaluated at every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs of disposal and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

##### 4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, increase rate of future medical claims, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government bonds (as there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Other key assumptions for the pension benefits and post-retirement medical benefits obligations are determined based on current market conditions.

5. Kas dan setara kas

5. Cash and cash equivalents

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Kas di bank:</b>			<b>Cash in bank:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Citibank N.A.	48,700	10,497	Citibank N.A.
JP Morgan Chase Bank N.A.	38,285	42,797	JP Morgan Chase Bank N.A.
PT Bank UOB Indonesia	31,397	-	PT Bank UOB Indonesia
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	17,398	9,572	Citibank N.A.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,930	635	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,325	359	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	139,035	63,860	
<b>Deposito berjangka:</b>			<b>Time deposits:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Banco Bradesco	55,000	-	Banco Bradesco
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	45,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
ANZ Bank	10,000	99,840	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	-	31,060	Standard Chartered Bank
National Bank of Canada	-	60,393	National Bank of Canada
Citibank N.A.	-	33,000	Citibank N.A.
BNP Paribas	-	13,000	BNP Paribas
	110,000	237,293	
Jumlah	249,035	301,153	Total

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
Deposito Dolar AS	2.6%	2.7%	US Dollar deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

6. Kas yang dibatasi penggunaannya

6. Restricted cash

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Kas di bank:</b>			<b>Cash in bank:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
MUFG Union Bank N.A.	-	15,607	MUFG Union Bank N.A.
<b>Deposito berjangka:</b>			<b>Time deposits:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	15,412	14,345	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah	15,412	29,952	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(15,412)	(14,345)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian lancar	-	15,607	Current portion

Rekening pada MUFG Union Bank N.A. ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019 (lihat Catatan 18).

The account with MUFG Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019 (refer to Note 18).

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang (lihat Catatan 39b).

The time deposits placed with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are intended as collateral in relation to the bank guarantee issued by the bank in relation to the reclamation and mine closure guarantees (refer to Note 39b).

**6. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)**

Perubahan kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan pembayaran pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember</b>	<b>2019</b>	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	<b>15,607</b>	15,890	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	<b>3,902</b>	39,394	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	<b>(19,509)</b>	(39,677)	Withdrawal of restricted cash
<b>Total perubahan dari arus kas pendanaan</b>	<b>(15,607)</b>	(283)	<b>Total changes from financing cash flows</b>
Saldo akhir	-	15,607	Ending balance

**6. Restricted cash (continued)**

The movement in restricted cash intended for payments of bank loan arising from financing activities is as follows:

**7. Piutang usaha**

<b>31 Desember</b>	<b>2019</b>	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak-pihak berelasi dalam mata uang Dolar AS	<b>107,295</b>	124,248	Related parties denominated in US Dollars

**7. Trade receivables**

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada piutang usaha yang dijaminkan, dan piutang usaha sebesar AS\$107,3 juta (2018: AS\$124,2 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2019 and 2018, there were no trade receivables pledged as collateral, and trade receivables of US\$107.3 million (2018: US\$124.2 million) (full amount) were not yet past due nor impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the year, management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2019 and 2018.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.

**8. Aset keuangan lainnya**

<b>31 Desember</b>	<b>2019</b>	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada karyawan	<b>6,289</b>	8,134	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	<b>1,088</b>	53	Receivables from contractors
Piutang bunga	-	639	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>7,377</b>	8,826	<b>Total</b>
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
- Pinjaman kepada karyawan	<b>(4,623)</b>	(6,300)	- Loans to employees
<b>Bagian lancar</b>	<b>2,754</b>	2,526	<b>Current portion</b>

**8. Other financial assets**

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh aset keuangan lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018, all other financial assets were not yet past due nor impaired. The aging analysis of these other financial assets is as follows:

<b>31 Desember</b>	<b>2019</b>	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Sampai dengan 3 bulan	<b>1,505</b>	1,151	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	<b>1,249</b>	1,375	3 months to 1 year
Lebih dari 1 tahun	<b>4,623</b>	6,300	More than 1 year
<b>Jumlah</b>	<b>7,377</b>	8,826	<b>Total</b>

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.

9. Persediaan

9. Inventories

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Nikel</b>			<b>Nickel</b>
Dalam proses	55,452	48,962	In process
Barang jadi	13,212	12,604	Finished
	<b>68,664</b>	61,566	
<b>Bahan pembantu</b>	<b>80,151</b>	70,213	<b>Supplies</b>
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(854)	-	Less: Provision for obsolete supplies
	<b>79,297</b>	70,213	
Jumlah	<b>147,961</b>	131,779	Total

Mutasi penyisihan untuk bahan pembantu usang:

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(854)	-	Provision for obsolete supplies
Saldo akhir	<b>(854)</b>	-	Ending balance

Manajemen yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang pada tanggal 31 Desember 2019.

Management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies as at December 31, 2019.

Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2019 and 2018.

Biaya persediaan yang dijual atau digunakan dalam operasi diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" (lihat Catatan 24).

The cost of inventories sold or used in operations is recognised as an expense and included in "cost of revenue" (refer to Note 24).

Pada tanggal 31 Desember 2019, semua persediaan telah diasuransikan bersama-sama dengan aset tetap Grup (lihat Catatan 11). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungjawaban asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

As at December 31, 2019, all inventories were insured together with the Group's fixed assets (refer to Note 11). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses.

10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

10. Prepayments and advances

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Asuransi dibayar di muka	1,977	2,430	Prepaid insurance
Uang muka ke pemasok	1,019	2,376	Advance to vendors
Lainnya	112	81	Others
Jumlah	<b>3,108</b>	4,887	Total

11. Aset tetap

11. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,526	-	2,953	(763)	934,716	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,596	-	3,923	(1,074)	73,445	Roads and bridges
Bangunan	647,454	-	76,298	(6,985)	716,767	Buildings
Pabrik dan mesin	1,714,912	-	74,804	(35,341)	1,754,375	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	22,153	-	790	(882)	22,061	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	51,979	2,606	20,456	(936)	74,105	Mine development
Sewa	-	2,303	-	-	2,303	Leases
Aset tetap dalam penyelesaian *)	162,655	166,367	(179,224)	-	149,798	Construction in progress *)
<b>Jumlah</b>	<b>3,602,275</b>	<b>171,276</b>	<b>-</b>	<b>(45,981)</b>	<b>3,727,570</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(392,365)	(21,650)	-	-	(414,015)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(39,134)	(4,321)	-	1,047	(42,408)	Roads and bridges
Bangunan	(495,930)	(20,631)	-	5,633	(510,928)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,192,878)	(79,429)	-	32,082	(1,240,225)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(21,075)	(549)	-	877	(20,747)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(26,383)	(4,746)	-	562	(30,567)	Mine development
Sewa	-	(1,218)	-	-	(1,218)	Leases
<b>Jumlah</b>	<b>(2,167,765)</b>	<b>(132,544)</b>	<b>-</b>	<b>40,201</b>	<b>(2,260,108)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1,434,510</b>				<b>1,467,462</b>	<b>Net book value</b>

\*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

\*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,621	-	-	(95)	932,526	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,642	-	-	(46)	70,596	Roads and bridges
Bangunan	642,995	-	5,604	(1,145)	647,454	Buildings
Pabrik dan mesin	1,680,110	-	56,934	(22,132)	1,714,912	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	34,309	-	388	(12,544)	22,153	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	76,991	-	2,829	(27,841)	51,979	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	129,444	103,369	(65,755)	(4,403)	162,655	Construction in progress *)
<b>Jumlah</b>	<b>3,567,112</b>	<b>103,369</b>	<b>-</b>	<b>(68,206)</b>	<b>3,602,275</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(367,014)	(25,424)	-	73	(392,365)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(34,994)	(4,180)	-	40	(39,134)	Roads and bridges
Bangunan	(478,245)	(18,560)	-	875	(495,930)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,137,968)	(75,866)	-	20,956	(1,192,878)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(33,222)	(397)	-	12,544	(21,075)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(21,880)	(4,503)	-	-	(26,383)	Mine development
<b>Jumlah</b>	<b>(2,073,323)</b>	<b>(128,930)</b>	<b>-</b>	<b>34,488</b>	<b>(2,167,765)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1,493,789</b>				<b>1,434,510</b>	<b>Net book value</b>

\*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

\*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

11. Aset tetap (lanjutan)

Grup menyewa ruang kantor dari PT Api Metra Graha dan bus dari PT Sinar Jaya Langgeng Utama (Catatan 32). Informasi mengenai sewa di mana Grup adalah penyewa disajikan sebagai berikut:

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Penyusutan/ Depreciation	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Bangunan	-	779	(360)	-	419	Buildings
Pabrik dan mesin	-	1,524	(858)	-	666	Plant and machinery
Jumlah	-	2,303	(1,218)	-	1,085	Total

11. Fixed assets (continued)

The Group leases an office space from PT Api Metra Graha and buses from PT Sinar Jaya Langgeng Utama (Note 32). Information about the leases under which the Group is a lessee is presented below:

Liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Liabilitas sewa	1,120	-	Lease liabilities
Dikurangi: Bagian jangka panjang	(173)	-	Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek	947	-	Current portion

Lease liabilities recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

Beban bunga yang diakui pada laba rugi dan pembayaran yang dilakukan oleh Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 masing-masing adalah AS\$63 ribu dan AS\$1.245 ribu (nilai penuh).

Interest expense recognised in profit or loss and payments made by the Group for the year ended December 31, 2019 were US\$63 thousand and US\$1,245 thousand (full amount), respectively.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 was allocated as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 24)	132,184	128,930	Cost of revenue (refer to Note 24)
Beban usaha	360	-	Operating expenses
Jumlah	132,544	128,930	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019, semua aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanikal atau elektrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk keseluruhan aset dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2019 adalah AS\$4.338 juta (31 Desember 2018: AS\$6.263 juta) (nilai penuh), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2018: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2019, all of the fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the total assets and related business interruption exposure as at December 31, 2019 was US\$4,338 million (December 31, 2018: US\$6,263 million) (full amount), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2018: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2019 and 2018.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$542,9 juta (31 Desember 2018: AS\$392,4 juta) (nilai penuh). Nilai buku bersih aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$542.9 million (December 31, 2018: US\$392.4 million) (full amount). Net book value of fixed assets which are permanently inactive and not classified as held for sale as at December 31, 2019 and 2018 was nil.

Grup telah melakukan pengkajian atas masa manfaat dan nilai sisa aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Group has performed a review of the useful lives and residual value of the Company's fixed assets as at December 31, 2019 and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terdapat penyesuaian atas kenaikan jumlah kewajiban penghentian pengoperasian aset yang dikapitalisasi dalam aset pengembangan tambang sebesar AS\$2,6 juta (31 Desember 2018: turun sebesar AS\$27,8 juta) (nilai penuh). Nilai tercatat aset tetap yang dilepas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah AS\$5,8 juta (31 Desember 2018: AS\$5,9 juta) (nilai penuh).

For the year ended December 31, 2019 there was an adjustment to increase the amount of the asset retirement obligation capitalised in mine development assets by US\$2.6 million (December 31, 2018: decrease of US\$27.8 million) (full amount). The carrying amount of fixed assets disposed for the year ended December 31, 2019 was US\$5.8 million (December 31, 2018: US\$5.9 million) (full amount)



## 12. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal pelaporan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember	2019	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pengembangan tambang 2019	17,609	79 - 99	2020	Mine development 2019
Mobile screening station	8,834	99	2020	Mobile screening station
Lainnya di bawah AS\$7 juta	123,355	-	-	Others below US\$7 million
<b>Jumlah</b>	<b>149,798</b>		<b>Total</b>	

31 Desember	2018	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu Penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pelapisan kanal Larona	41,507	55	2019	Larona canal lining
Pengembangan tambang 2018	25,530	90 - 96	2019	Mine development 2018
Lainnya di bawah AS\$7 juta	95,618	-	-	Others below US\$7 million
<b>Jumlah</b>	<b>162,655</b>		<b>Total</b>	

## 13. Utang usaha

## 13. Trade payables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	2,071	1,620	Denominated in US Dollars
	<b>2,071</b>	1,620	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	63,132	48,809	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Dolar AS	26,701	26,435	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Euro	591	12,017	Denominated in Euro
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	4,913	2,300	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	<b>95,337</b>	89,561	
<b>Jumlah</b>	<b>97,408</b>	91,181	<b>Total</b>

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah jangka pendek sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement.

There were no guarantees made by the Group for its payables as at December 31, 2019 and 2018.

Refer to Note 33 for details of related party balances and transactions.

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak penghasilan badan ("PPh Badan")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2019	29,146	-	- CIT 2019
- PPh Badan 2018	6,988	-	- CIT 2018
- PPh Badan 2017	-	9,250	- CIT 2017
	<b>36,134</b>	9,250	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam sengketa *)	119,233	107,652	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	77,616	49,459	- Value Added Tax ("VAT")
- Pajak impor	743	718	- Import tax
	<b>197,592</b>	157,829	
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(8,746)	-	Less: Provision for impairment
Jumlah	<b>224,980</b>	167,079	Total
Dikurangi: Bagian lancar	(78,160)	(50,798)	Less: Current portion
Bagian tidak lancar	<b>146,820</b>	116,281	Non-current portion

\*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

\*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

Manajemen yakin bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari ketidakpastian posisi pajak.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses from uncertain tax positions.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
PPh Badan	-	1,119	CIT
Pajak lainnya			Other taxes
- PPh pasal 21	901	1,251	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	473	365	- WHT articles 4(2), 15, 22, 23 and 26
- PPN terhutang	400	165	- VAT payable
	<b>1,774</b>	1,781	
Jumlah	<b>1,774</b>	2,900	Total

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The consolidated income tax expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kini	34,207	37,467	Current
Tanggungan	(10,373)	(16,001)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous year adjustment
<b>Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian</b>	<b>31,736</b>	<b>22,105</b>	<b>Total consolidated income tax expense</b>

Perhitungan pajak penghasilan kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak yang dapat direvisi pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Basis yang digunakan dalam estimasi ini sama dengan yang digunakan dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax calculations for the years ended December 31, 2019 and 2018 are based on estimated taxable income and may be revised when filing annual tax returns. The basis used for the estimates is the same as that used in the preparation of the annual tax return to be filed with the tax authority.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in these consolidated financial statements and the estimated consolidated taxable income for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	-	-	Profit before income tax - subsidiaries
<b>Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan</b>	<b>89,136</b>	<b>82,617</b>	<b>Profit before income tax - the Company</b>
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	42,917	38,945	Difference between commercial and tax depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	5,291	262	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2,324	5,780	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	854	-	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(315)	640	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(9,581)	18,377	Other accruals/provisions
Pendapatan kena pajak final	(815)	(512)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7,015	3,761	Non-deductible expenses
<b>Penghasilan kena pajak - Perseroan</b>	<b>136,826</b>	<b>149,870</b>	<b>Taxable income - the Company</b>
Pajak penghasilan kini pada tarif 25% - Perseroan	34,207	37,467	Current income tax at 25% - the Company
Pajak penghasilan kini - entitas anak	-	-	Current income tax - subsidiaries
<b>Pajak penghasilan kini - konsolidasian</b>	<b>34,207</b>	<b>37,467</b>	<b>Current income tax - consolidated</b>
Pembayaran pajak di muka - konsolidasian	(63,353)	(36,348)	Prepayment of income taxes - consolidated
<b>(Lebih)/kurang bayar pajak - konsolidasian</b>	<b>(29,146)</b>	<b>1,119</b>	<b>(Over)/under payment of tax - consolidated</b>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of consolidated income tax expense to the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	89,136	82,617	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	22,284	20,654	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,754	940	Non-deductible expenses
Pendapatan kena pajak final	(204)	(128)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,902	639	Previous years adjustments
<b>Beban pajak penghasilan konsolidasian</b>	<b>31,736</b>	<b>22,105</b>	<b>Consolidated income tax expense</b>

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2019 and 2018 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2019	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	119,226	(15,281)	-	103,945	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(3,999)	(1,045)	189	(4,855)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(16,953)	5,863	-	(11,090)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	-	(214)	-	(214)	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(325)	130	-	(195)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(7,275)	174	-	(7,101)	Other accruals/provisions
<b>Liabilitas pajak tangguhan, bersih</b>	<b>90,674</b>	<b>(10,373)</b>	<b>189</b>	<b>80,490</b>	<b>Deferred tax liabilities, net</b>

	1 Januari/ January 1, 2018	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	128,962	(9,736)	-	119,226	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(5,216)	(66)	1,283	(3,999)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(15,508)	(1,445)	-	(16,953)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(165)	(160)	-	(325)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(2,681)	(4,594)	-	(7,275)	Other accruals/provisions
<b>Liabilitas pajak tangguhan, bersih</b>	<b>105,392</b>	<b>(16,001)</b>	<b>1,283</b>	<b>90,674</b>	<b>Deferred tax liabilities, net</b>

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Jenis Pajak/ Tax Assessment Letter/ Tax Type	Tahun pajak/ Fiscal year	Nilai awal sengketa pajak/ Original tax in-dispute amount	Diterima oleh Grup atau kalah pada banding terakhir/ Accepted by the Group or lost on final appeal	Restitusi/ Refund	Selisih nilai tukar mata uang asing dan penyesuaian lainnya/ Exchange rate and other adjustments	Saldo akhir dan status terakhir per 31 Desember 2019/ Ending balance and latest status as of December 31, 2019	Catatan/ Notes
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
00003/204/04/091/11 PPh Pasal 26/WHT Article 26	2004	9,439	(1,159)	(7,124)	(403)	753	a)
00003/206/04/091/11 PPh Badan/CIT	2004	4,629	(1,112)	-	-	3,517	a)
00006/206/06/091/11 PPh Badan/CIT	2006	6,406	(466)	-	-	5,940	a)
00009/207/06/091/11 PPN/VAT	2006	4,069	(2,563)	(506)	(1,000)	-	b)
00014/406/08/091/10 PPh Badan/CIT	2008	1,931	-	-	-	1,931	a)
00006/206/10/091/14 PPh Badan/CIT	2010	19,410	-	(10,910)	-	8,500	a)
00007/406/11/091/13 PPh Badan/CIT	2011	4,911	-	(839)	1	2,758	a)
					-	1,315	c)
00026/406/12/091/14 PPh Badan/CIT	2012	647	-	-	-	647	a)
00056/207/13/091/17 sampai dengan/To 00067/207/13/091/17 PPN/VAT	2013	8,871	-	(162)	(89)	8,620	e)
00007/206/14/091/17 PPh Badan/CIT	2014	38,040	-	-	-	38,040	f)
00002/245/14/091/17 sampai dengan/To 00013/245/14/091/17 PPh Pasal 26/WHT Art.26	2014	20,789	-	-	412	21,201	f)
00024/406/15/091/17 PPh Badan/CIT	2015	3,820	-	-	-	3,820	d)
00001/203/15/803/17 PPh Pasal 23/WHT Article 23	2015	811	-	(1)	(24)	786	d)
00039/406/16/091/18 PPh Badan/CIT	2016	7,942	-	-	-	7,942	g)
00023/406/17/091/19 PPh Badan/CIT	2017	2,355	-	-	-	2,355	g)
10148/84/DBN.PL/2018 PNBP/ Non-Tax State Revenue	2014-2016	1,036	-	-	-	1,036	h)
Surat ketetapan pajak lainnya*/ Other tax assessment letters*		11,635	(462)	(959)	(142)	10,072	
<b>Total pajak dalam proses banding/ Total taxes in-dispute</b>		<b>146,741</b>	<b>(5,762)</b>	<b>(20,501)</b>	<b>(1,245)</b>	<b>119,233</b>	

\* Dengan nilai saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 kurang dari AS\$0,5 juta per ketetapan/

\* With ending balances as of December 31, 2019 less than US\$0.5 million per assessment.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- a) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Assistance Agreement* ("MAA") kepada VCL dimana Direktorat Jenderal Pajak menilai sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan dipotong PPh Pasal 26. Khusus untuk tahun pajak 2010, sengketa juga melibatkan pembayaran *Technical Assistance Agreement* ("TAA") kepada VCL. Perseroan tidak setuju dengan ketetapan ini.

Sengketa yang belum terselesaikan dengan jumlah total AS\$22,1 juta (nilai penuh) sedang dilakukan banding melalui jalur *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

Khusus untuk tahun pajak 2004, Perseroan juga meyakini bahwa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2011, telah melewati batas waktu lima tahun sesuai P3B tersebut. Untuk sengketa tahun pajak 2008 senilai AS\$1,9 juta (nilai penuh), Perseroan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

- b) Sengketa PPN ini terkait dengan koreksi atas pembayaran jasa luar negeri yang dapat dikreditkan. Pada tanggal 17 Juni 2019, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali Perseroan dan jumlah ini telah dibebankan.
- c) Sengketa terkait biaya-biaya pinjaman SEFA sebesar AS\$1,3 juta (nilai penuh) yang dianggap tidak seharusnya dibebankan kepada Perseroan, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perseroan meyakini bahwa biaya-biaya dalam rangka perolehan pinjaman untuk kepentingan usaha utama dalam hal ini perusahaan nikel dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan dan juga KK. Sengketa pajak ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

- d) Sengketa terkait koreksi atas biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya-biaya Akademi Teknik Sorowako, biaya-biaya Jasa Manajemen dan Teknis, biaya-biaya royalti, biaya-biaya jaminan hutang, biaya konsultan, biaya pengiriman, biaya konsinyasi stok, biaya kontribusi lainnya, dan biaya donasi dengan jumlah koreksi sebesar AS\$4,6 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
- e) Sengketa terkait koreksi utamanya atas penyebaran slag pada jalan tambang dan jasa luar negeri dengan jumlah koreksi sebesar AS\$17,6 juta (nilai penuh). Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar IDR2,5 miliar atau setara dengan AS\$0,2 juta (nilai penuh) dimana telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayarkan 50% dari sisa saldo tersebut dan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

- f) Sengketa terkait koreksi atas peredaran usaha, biaya-biaya pengembangan proyek, jaminan hutang, royalti dan biaya-biaya yang dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Koreksi atas peredaran usaha juga dianggap sebagai deviden sehingga dijadikan obyek koreksi untuk PPh Pasal 26. Koreksi lainnya adalah PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden yang dipertimbangkan salah menggunakan tarif pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah sebesar AS\$62,4 juta (nilai penuh).

Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar AS\$40,0 ribu (nilai penuh) serta telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

- a) The tax dispute is related to the Management Assistance Agreement ("MAA") fees paid to VCL which the Director General of Tax has assessed to be dividends and therefore not deductible for taxable income and subject to WHT Article 26. Specifically for the 2010 fiscal year case, the tax assessment also includes the payment of Technical Assistance Agreement ("TAA") fees to VCL. The Company does not agree with these assessments.

The outstanding disputes in the amount of US\$22.1 million (full amount) are currently in the appeal process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with the Double Tax Avoidance Agreement ("DTAA") between the Indonesian and Canadian Tax Authorities.

Specifically for the fiscal year 2004, the Company also believes that the tax assessment letter which was issued on February 22, 2011, has exceeded the five-year time limit in accordance with the DTAA. For the disputed amount of US\$1.9 million (full amount) for the fiscal year 2008, the Company has submitted a reconsideration letter to the Supreme Court.

- b) This dispute relates to claimable VAT on payment of offshore service fees. On June 17, 2019, the Supreme Court, has rejected the Company's reconsideration, and the amount has been expensed.
- c) The tax dispute is on expenses related to SEFA in the amount of US\$1.3 million (full amount) which was considered non-deductible for the taxable income calculation.

The Company believes that the expenses related to securing loans which were used to fund the Company's main business of processing nickel, should be treated as deductible in the taxable income calculation, in accordance with prevailing regulations and the CoW. The dispute is still in the Reconsideration process at the Supreme Court.

- d) The tax dispute for expenses related to cost of project development, Technical Academy of Sorowako, Management and Technical Services, royalty, guarantee fee, consultancy, freight charges, consignment stock, other contributions, and donations in the total correction amount of US\$4.6 million (full amount). The Company filed an objection to these disputed amounts. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal letter to the Tax Court.
- e) The tax dispute is related mostly with the slag usage on the mining road and offshore services with total disputed amount of US\$17.6 million (full amount). The Company partially agreed and has paid IDR2.5 billion or equivalent to US\$0.2 million (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company paid 50% of the remaining balance and has filed an objection. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal to the Tax Court.

- f) The tax disputes are related to adjustment on revenue, project development costs, guarantee fee, royalty, other expenses which are considered by the Director General of Tax to be non-deductible expenses.

The adjustment to revenue is also deemed as a dividend subject to Withholding Tax ("WHT") article 26. The other WHT article 26 adjustment is related to under-withheld WHT article 26 on dividend payment which was considered to have used the incorrect WHT rate. The total adjustments amount to US\$62.4 million (full amount).

The Company partially agreed and paid US\$40.0 thousand (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Di 2018, Perseroan telah membayar sebagian yaitu sejumlah AS\$49,4 juta (nilai penuh), dan Perseroan tidak melakukan pembayaran atas koreksi sebesar AS\$12,9 juta (nilai penuh) koreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden kepada Pemegang Saham Pendiri yang dianggap kurang potong karena dianggap salah menggunakan tarif pajak dan Perseroan telah mengajukan keberatan. Keberatan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Namun Direktur Jenderal Pajak secara sepihak melakukan kompensasi atas lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 sebesar AS\$6,9 juta dan restitusi PPN bulan Mei 2018 sebesar AS\$3,5 juta kepada nilai sengketa PPh Pasal 26 yang tidak disetujui Perseroan tersebut. Perseroan sedang berupaya untuk mendapatkan kembali lebih bayar PPh Badan Tahun 2017 dan restitusi PPN bulan Mei 2018 yang dikompensasikan karena sengketa pajak ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Pajak.

g) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Service Agreement* ("MSA") dan *Technical Service Agreement* ("TSA") kepada VCL dan Vale Technology Development Ltd ("VTDL") yang dianggap sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sengketa ini juga terkait dengan biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya jaminan hutang dan biaya-biaya lain yang dianggap tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah AS\$10,3 juta (nilai penuh). Untuk tahun pajak 2016, keberatan Perseroan telah ditolak dan Perseroan akan mengajukan banding atas koreksi-koreksi tersebut, sementara itu untuk tahun pajak 2017, Perseroan telah mengajukan keberatan.

h) Sengketa terkait dugaan kurang bayar royalti kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penjualan nikel *matte* untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena ketidaktepatan dalam mengenakan tarif.

Jumlah koreksi-koreksi tersebut AS\$1,0 juta (nilai penuh). Perseroan tidak setuju atas koreksi-koreksi ini dan telah mengajukan keberatan. Perseroan telah menerima Surat Keputusan Keberatan yang menolak keberatan Perseroan, dan telah pula mengajukan gugatan atas keputusan tersebut.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

In 2018, the Company partially paid the amount of US\$49.4 million (full amount) with the exception of a disputed amount of US\$12.9 million (full amount) on WHT article 26 adjustment in relation to under-withheld dividend payment to the Founding Shareholders, and the Company has filed objection letters on these disputes. The objections were rejected by the Director General of Tax and the Company has filed appeals to the Tax Court. However, the Director General of Tax has unilaterally offset the 2017 CIT overpayment of US\$6.9 million and VAT refund for May 2018 period of US\$3.5 million against this WHT article 26 which was not agreed to by the Company. The Company is following up to obtain back the 2017 CIT overpayment and VAT refund for May 2018 period which were offset, as the dispute is still in the Tax Court process.

g) The tax dispute is related to the payment of Management Service Agreement ("MSA") and Technical Service Agreement ("TSA") fees to VCL and Vale Technology Development Ltd ("VTDL") which were deemed to be dividends, and therefore non-deductible against taxable income. The disputes were also related to cost of project development, guarantee fees and other expenses which are deemed to be non-deductible expenses. The total adjustment is US\$10.3 million (full amount). For the fiscal year 2016, the Company objection was rejected and the Company will file an appeal on this dispute, while for the fiscal year 2017, the Company has also filed an objection.

h) The dispute is related to an alleged underpayment of royalty to the Government of the Republic of Indonesia on nickel matte sales for the years 2014 to 2016 due to incorrect rate used.

The total adjustment is US\$1.0 million (full amount). The Company is not in agreement with the adjustment and filed an objection on this dispute. The Company received the Objection Decision Letter that rejected the Objection, and the Company has filed a law suit on the decision.

15. Akrual

15. Accruals

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Barang dan jasa	11,448	9,748	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	3,430	13,156	Royalties, water levy, land rent and others
Barang modal	1,449	1,987	Capital items
Biaya keuangan	-	708	Finance costs
Jumlah	16,327	25,599	Total

Lihat Catatan 33f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33f for details of related party balances and transactions.

Perubahan akrual atas biaya keuangan yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

The movement in accruals of finance costs arising from financing activities is as follows:

15. Akrual (lanjutan)

15. Accruals (continued)

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	708	1,141	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Pembayaran atas bunga	(849)	(2,177)	Payments of interest
Pembayaran atas biaya jaminan garansi	(315)	(1,035)	Payments of guarantee fee
	(1,164)	(3,212)	
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Akrual biaya bunga	333	1,939	Accrued interest expense
Akrual biaya jaminan dan agen	123	840	Accrued guarantee and agency fee
	456	2,779	
Saldo akhir	-	708	Ending balance

16. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

16. Other current financial liabilities

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang dividen	556	642	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	3,197	634	Other non-operational payables
Jumlah	3,753	1,276	Total

17. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

17. Short-term employee benefit liabilities

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	15,563	15,823	Salaries, wages and other employee benefits

18. Pinjaman bank jangka Panjang

18. Long-term bank borrowings

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	25,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	12,500	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(981)	Unamortised debt issuance costs
	-	36,519	
Bagian jangka pendek:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	(12,500)	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	981	Unamortised debt issuance costs
Total bagian jangka pendek	-	(36,519)	Total current portion
Bagian jangka panjang	-	-	Non-current portion
Perubahan pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:			The movement in bank borrowings arising from financing activities is as follows:
31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	36,519	73,038	Beginning balance
Perubahan arus kas:			Cash flow changes:
Pembayaran pinjaman bank	(37,500)	(37,500)	Repayment of bank borrowings
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Amortisasi biaya pinjaman	981	981	Amortisation of debt issuance costs
Saldo akhir	-	36,519	Ending balance



### 18. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Biaya keuangan yang terkait dengan pinjaman bank jangka panjang ini dibebankan pada laba rugi selama tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar AS\$1,5 juta (31 Desember 2018: AS\$4,2 juta) (nilai penuh).

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") dengan Mizuho Bank, Ltd (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dan Mizuho Bank, Ltd sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh) (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh). Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

### 19. Liabilitas imbalan pascakerja

Program dana pensiun untuk karyawan Grup adalah program *defined contribution* dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang ditunjuk oleh Grup.

Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, Grup diharuskan memberikan imbalan pascakerja tertentu kepada karyawannya saat diberhentikan atau saat mereka pensiun. Manfaat ini terutama didasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penghentian atau masa pensiun.

Liabilitas atas imbalan kerja pada 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris yang berkualifikasi pada laporannya tertanggal 12 Februari 2020 (31 Desember 2018: 16 Januari 2019).

Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	11,366	6,669	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,053	8,209	Post-retirement medical benefits
<b>Jumlah</b>	<b>19,419</b>	<b>14,878</b>	<b>Total</b>

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	
<b>Asumsi ekonomi:</b>					<b>Economic assumptions:</b>
Tingkat diskonto (IDR)	7.50%	8.25%	7.75%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	6.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	11.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
<b>Asumsi lainnya:</b>					<b>Other assumptions:</b>
Tingkat mortalita	2019 TMI 2011		2018 TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years		55 tahun/years		Normal retirement age

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto, biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

### 18. Long-term bank borrowings (continued)

Finance costs related to the long-term bank borrowings that were charged to profit or loss during the year ended December 31, 2019 amounted to US\$1.5 million (December 31, 2018: US\$4.2 million) (full amount).

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") with Mizuho Bank, Ltd (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd and Mizuho Bank, Ltd, as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

The Borrower has fully drawn down the SEFA of US\$300 million (full amount) (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd of US\$100 million) (full amount). The credit facilities were utilised solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.

### 19. Post-employment benefit liabilities

The pension plan fund for the Group's employees is a defined contribution plan that is managed by a pension fund financial institution ("DPLK") appointed by the Group.

In accordance with Indonesian labor regulations, the Group is required to provide certain post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The employee benefit liabilities as at December 31, 2019 and 2018 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, a qualified actuary with its reports dated February 12, 2020 (December 31, 2018: January, 16, 2019).

The liability in the consolidated statements of financial position consists of:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	11,366	6,669	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,053	8,209	Post-retirement medical benefits
<b>Jumlah</b>	<b>19,419</b>	<b>14,878</b>	<b>Total</b>

The principal actuarial assumptions used were as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	
<b>Asumsi ekonomi:</b>					<b>Economic assumptions:</b>
Tingkat diskonto (IDR)	7.50%	8.25%	7.75%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	6.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	11.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
<b>Asumsi lainnya:</b>					<b>Other assumptions:</b>
Tingkat mortalita	2019 TMI 2011		2018 TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years		55 tahun/years		Normal retirement age

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of government bonds in the active capital market at the reporting date.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The rate of salary increase is generally determined based on inflation adjustments to pay scales and increases in length of service.

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Asumsi tentang bagaimana klaim akan meningkat di masa depan dikenal sebagai tingkat kenaikan klaim. Tren biaya klaim di masa mendatang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemanfaatan, inflasi umum, perkembangan medis, dan ketersediaan pelayanan medis. Pada umumnya, biaya klaim meningkat lebih cepat dari pada tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 31 Desember 2019, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti untuk imbalan pensiun adalah 9,39 tahun (31 Desember 2018: 10,69 tahun) dan imbalan kesehatan pascakerja adalah 12,51 tahun (31 Desember 2018: 15,17 tahun).

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

The actuarial assumptions also factor in how future claims will increase which is influenced by several factors such as utilisation, general inflation, medical developments, and availability of medical services. Generally, the claim costs have risen faster than price inflation in recent years.

As of December 31, 2019, the weighted average duration of the defined contribution obligation for pension benefits was 9.39 years (December 31, 2018: 10.69 years) and post-retirement medical benefits was 12.51 years (December 31, 2018: 15.17 years).

The movement in post-employment benefits obligation over the year is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	6,669	8,969	8,209	10,320	14,878	19,289	At beginning of the year
<b>Diakui di laba rugi</b>							<b>Recognised in profit or loss</b>
- Biaya jasa kini	647	694	2	6	649	700	- Current service cost
- Biaya bunga	552	567	683	689	1,235	1,256	- Interest cost
- Biaya jasa lalu	3,388	-	-	-	3,388	-	- Past service cost
<b>Diakui di penghasilan komprehensif lain</b>							<b>Recognised in other comprehensive income</b>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(229)	(1,031)	(203)	(1,796)	(432)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	469	(1,637)	(792)	(667)	(323)	(2,304)	- Experience adjustments
<b>Lain-lain</b>							<b>Others</b>
- Pembayaran manfaat	(513)	(557)	(71)	(139)	(584)	(696)	- Benefits paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	383	(336)	225	(204)	608	(540)	- Effect of difference in reporting currency
<b>Liabilitas imbalan pascakerja, akhir tahun</b>	<b>11,366</b>	<b>6,669</b>	<b>8,053</b>	<b>8,209</b>	<b>19,419</b>	<b>14,878</b>	<b>Post-employment benefit liabilities, end of year</b>

Biaya jasa lalu yang diakui di tahun 2019 disebabkan oleh perubahan manfaat sesuai dengan PKB tahun 2018-2020 yang telah disahkan di tanggal 11 November 2019.

Past service cost recognised in 2019 was due to changes in benefits in accordance with the 2018-2020 CLA which was ratified on November 11, 2019.

Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	(1,674)	994	2,931	5,394	1,257	6,388	At beginning of the year
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>							<b>Other comprehensive income for the year</b>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(229)	(1,031)	(203)	(1,796)	(432)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	469	(1,637)	(792)	(667)	(323)	(2,304)	- Experience adjustments
<b>Jumlah kumulatif (keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain</b>	<b>(1,434)</b>	<b>(1,674)</b>	<b>1,936</b>	<b>2,931</b>	<b>502</b>	<b>1,257</b>	<b>Total cumulative actuarial (gain)/ loss recognised in other comprehensive income</b>

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

Luran ke DPLK selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Contributions to DPLK over the year are as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Oleh Grup	2,760	2,656	By the Group
Oleh karyawan	578	555	By employees
<b>Jumlah</b>	<b>3,338</b>	<b>3,211</b>	<b>Total</b>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and post-retirement medical benefits, is as follows:

31 Desember 2019	Imbalan pension/ Pension benefits	Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits	Jumlah/ Total	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Kurang dari 1 tahun	303	342	645	Less than 1 year
1 sampai dengan 10 tahun	10,330	3,490	13,820	1 year – 10 years
Lebih dari 10 tahun	30,138	4,563	34,701	More than 10 years
<b>Jumlah</b>	<b>40,771</b>	<b>8,395</b>	<b>49,166</b>	<b>Total</b>

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five years history of experience adjustments is as follows:

	2019	2018	2017	2016	2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(19,419)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(323)	(2,304)	(882)	447	4,628	Experience adjustments on plan liabilities

Jika asumsi yang digunakan berbeda dari estimasi manajemen, nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

If the assumptions differed from management's estimates, the carrying amount of pension obligations would be as follows:

31 Desember 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(905)	(854)	Discount rate
	-1%	1,025	1,028	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	543	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(501)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	986	Future claim increase rate
	-1%	-	(838)	

31 Desember 2018	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2018
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(543)	(895)	Discount rate
	-1%	620	1,084	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	246	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(231)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	1,037	Future claim increase rate
	-1%	-	(877)	

## 20. Modal saham

Pemegang saham Perseroan dan jumlah kepemilikan saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	
VCL	5,835,607,960	80,115	58.73	VCL
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
<b>Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9,936,338,720</b>	<b>136,413</b>	<b>100</b>	<b>Total shares issued and fully paid</b>

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The Company's shareholders and number of shares with the related par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:

No public shareholder owned more than 5% of the total issued and fully paid shares at December 31, 2019 and 2018.

## 21. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

## 21. Dividends declared

The Company did not declare dividends for the years ended December 31, 2019 and 2018.

## 22. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,8 juta (31 Desember 2018: AS\$277,8 juta) (nilai penuh) yang merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham Perseroan di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983.

## 22. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.8 million (December 31, 2018: US\$277.8 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of the Company's shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983.

## 23. Cadangan modal

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Grup wajib membentuk cadangan umum sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248,4 miliar atau setara dengan AS\$136,4 juta (nilai penuh); sehingga, cadangan umum minimum yang disyaratkan bagi Grup adalah sebesar AS\$27,3 juta (nilai penuh).

## 23. Capital reserves

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Group shall set up a general reserve at a minimum amount of 20% of the issued and paid up capital of the Company. The Company's issued and paid up capital is IDR248.4 billion or equivalent to US\$136.4 million (full amount); therefore, the minimum required general reserve for the Group is US\$27.3 million (full amount).

Jumlah cadangan umum minimum Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah terpenuhi.

The Group's minimum general reserve as of December 31, 2019 and 2018 has been fulfilled.

## 24. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

## 24. Cost of revenue

Cost of revenue for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bahan bakar minyak dan pelumas	146,376	156,352	Fuels and lubricants
Depresiasi	132,184	128,930	Depreciation
Bahan pembantu	120,849	113,740	Supplies
Jasa kontraktor	92,897	80,603	Contractors' services
Biaya karyawan	80,926	85,036	Employee costs
Bahan bakar batubara	44,383	61,823	Coal
Pajak dan asuransi	29,838	36,913	Taxes and insurance
Royalti	15,862	15,715	Royalties
Lainnya	9,341	6,893	Others
	<b>672,656</b>	<b>686,005</b>	
Persediaan dalam proses			In-process inventory
Persediaan awal	48,962	38,089	Beginning balance
Persediaan akhir	(55,452)	(48,962)	Ending balance
Beban pokok produksi	<b>666,166</b>	675,132	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	12,604	10,371	Beginning balance
Persediaan akhir	(13,212)	(12,604)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	<b>665,558</b>	672,899	Cost of revenue

Lihat Catatan 33d untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33d for details of related party transactions.

**24. Beban pokok pendapatan** (lanjutan)

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pihak ketiga			Third parties
PT Pertamina (Persero)	66,813	676	PT Pertamina (Persero)
Mercuria Energy Trading Pte. Ltd	22,466	105,397	Mercuria Energy Trading Pte. Ltd
Jumlah	89,279	106,073	Total

**25. Beban usaha**

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	6,272	6,852	Management service, license and royalty fees
Biaya karyawan	3,296	1,643	Employee costs
Biaya jasa profesional	2,827	1,390	Professional fees
Lainnya	1,335	1,693	Others
Jumlah	13,730	11,578	Total

Lihat Catatan 33c untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**24. Cost of revenue** (continued)

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total cost of revenue:

**25. Operating expenses**

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Refer to Note 33c for details of related party transactions.

**26. Pendapatan lainnya**

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Bunga dari piutang perpanjangan waktu pembayaran piutang	1,426	1,974	Interest on extended payment terms of trade receivables
Laba selisih kurs, neto	1,141	-	Gain on currency translation adjustments, net
Lainnya	699	5,641	Others
Jumlah	3,266	7,615	Total

Lihat Catatan 33a untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**26. Other income**

The components of other income for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Refer to Note 33a for details of related party transactions.

**27. Beban lainnya**

Rincian beban lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Rugi pelepasan aset tetap	4,887	1,447	Loss on disposal of fixed assets
Biaya pengembangan proyek	3,807	8,132	Project development costs
Biaya karyawan	2,344	1,214	Employment costs
Beban pajak	2,200	470	Tax expenses
Rugi selisih kurs, neto	-	768	Loss on currency translation adjustments, net
Lainnya	4,463	3,153	Others
Jumlah	17,701	15,184	Total

Beban lainnya adalah beban yang berhubungan dengan dari kegiatan non-operasional Grup, antara lain, rugi pelepasan aset tetap, biaya pengembangan proyek, pembayaran kepada karyawan, beban terkait putusan akhir peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan lain-lain.

**27. Other expenses**

The components of other expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Other expenses are expenses related to the Group's non-operational activities, among others, loss on disposal of fixed assets, project development costs, employee costs, expenses related to the final decision of reconsideration in Supreme Court and others.

## 28. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	37,833	74,916	Beginning balance
Penyisihan/(pembalikan) tahun berjalan	2,606	(33,472)	Provisions/(reversal) made during the year
Beban akresi	2,324	2,615	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	1,598	(6,226)	Effect of exchange rate differences
Saldo akhir	44,361	37,833	Ending balance

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Grup mengakui provisi atas biaya penghentian pengoperasian aset sebesar IDR616,5 miliar atau setara dengan AS\$44,4 juta (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: IDR544,9 miliar atau setara dengan AS\$37,8 juta (nilai penuh)). Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2045 dan 2060. Provisi tersebut diestimasi berdasarkan biaya penutupan menggunakan teknologi dan material yang tersedia sekarang, pada tingkat harga kini, dan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto bebas risiko di Indonesia sebesar 4,78% (31 Desember 2018: 5,73%).

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Pada tahun 2019, Perseroan merubah rencana penambangan dan produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan perubahan estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2041 dan 2056 menjadi antara tahun 2045 dan 2060. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

Grup dibantu oleh PT ERM Indonesia, konsultan lingkungan yang berkualifikasi, dalam menghitung biaya penutupan operasi Perseroan di Sulawesi sehubungan dengan Rencana Penutupan Tambang. Perhitungan biaya penutupan tambang meliputi asumsi umur aset berdasarkan ketentuan KK (lihat Catatan 1) disesuaikan dengan perpanjangan yang diasumsikan sebagaimana di atas, untuk penyelesaian operasi penambangan yang diikuti dengan penutupan pabrik pengolahan setelah penipisan sisa tumpukan bijih.

## 29. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Grup di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan pada laba rugi adalah sebesar AS\$4,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: AS\$2,1 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$40,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: AS\$5,1 juta) (nilai penuh).

## 30. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar AS\$86,5 juta (31 Desember 2018: AS\$87,9 juta) (nilai penuh).

## 28. Provision for asset retirement

Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	37,833	74,916	Beginning balance
Penyisihan/(pembalikan) tahun berjalan	2,606	(33,472)	Provisions/(reversal) made during the year
Beban akresi	2,324	2,615	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	1,598	(6,226)	Effect of exchange rate differences
Saldo akhir	44,361	37,833	Ending balance

Accretion expense is recognised as part of finance costs in profit or loss.

The Group recognises a provision for asset retirement cost of IDR616.5 billion or equivalent to US\$44.4 million (full amount) as at December 31, 2019 (December 31, 2018: IDR544.9 billion or equivalent to US\$37.8 million (full amount)). This cost is expected to be incurred between 2045 and 2060. The provision is estimated based on closure costs using existing technology and materials that are currently available, at the current price level, and discounted using the Indonesian risk-free rate of 4.78% (December 31, 2018: 5.73%).

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2051 to between 2041 and 2056. In 2019, the Company changed its mining and production plan at South and Central Sulawesi areas which resulted in a change in the estimated period of mine closure from between 2041 and 2056 to between 2045 and 2060. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten-year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

The Group is assisted by PT ERM Indonesia, a qualified environmental consultant, in calculating the closure costs of the Company's operations in Sulawesi in conjunction with the Mine Closure Plan. The closure cost calculation includes the assumption of asset life in accordance with the term of the CoW (refer to Note 1) adjusted for assumed extensions as referred to above, for completion of mining operations closely followed by shutdown of the processing plant after depletion of residual ore stockpiles.

## 29. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan.

For the year ended December 31, 2019, a number of initiatives, representing part of the Group's commitments under these plans, were completed while others were still in progress including the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to profit or loss were US\$4.8 million for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$2.1 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$40.8 million for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$5.1 million) (full amount).

## 30. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2019 amounted to US\$86.5 million (December 31, 2018: US\$87.9 million) (full amount).

### 31. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

### 31. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders of the parent entity by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham)			(US Dollars, in thousands, except earnings per share)
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham entitas induk	57,400	60,512	Total profit for the year attributable to the shareholders of parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Laba per saham dasar (dalam AS\$)	0.0058	0.0061	Basic earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2019 and 2018 there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

### 32. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini:

### 32. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
PT Pertamina (Persero)	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	11 Agustus 2019 - 10 April 2022/ August 11, 2019 - April 10, 2022
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Juli 2019 - 30 Juni 2022/ July 1, 2019 - June 30, 2022
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batubara/ Purchase of coal	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020*/ January 31, 2019 - January 31, 2020*
PT Trubaindo Coal Mining	Pembelian batubara/ Purchase of coal	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020*/ January 31, 2019 - January 31, 2020*
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	1 Januari 2016 - 31 Desember 2020/ January 1, 2016 - December 31, 2020
PT Cipta Krida Bahari	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Mei 2015 - 30 April 2020/ May 1, 2015 - April 30, 2020

\*) Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.

\*) Agreements are in the process of extension.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Grup memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya modal dengan pemasok pihak ketiga sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018, the Group had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Tidak lebih dari 1 tahun	284,792	162,789	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	29,867	102,328	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	115	Later than 5 years
Jumlah	314,659	265,232	Total

Pengeluaran modal yang telah diperjanjikan pada akhir tahun pelaporan namun belum diakui sebagai liabilitas adalah senilai AS\$3,3 juta (nilai penuh).

Capital expenditure contracted for at the end of the reporting year but not yet recognised as liabilities is amounted to US\$3.3 million (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki sewa berikut yang diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait:

As at December 31, 2019, the Group has the following lease recognized as right-of-use assets and a corresponding liability:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
PT Api Metra Graha	Sewa Gedung Kantor Jakarta/ Rental Building for Jakarta Office	2 November 2015 - 31 Maret 2021/ November 2, 2015 - March 31, 2021
PT Sinar Jaya Langgeng Utama	Sewa Bus Transportasi/ Rental Bus Transportation	5 April 2019 - 31 Juli 2020/ April 5, 2019 - July 31, 2020

### 33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

Grup berada di bawah pengendalian VCL. Pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan dan pendapatan lainnya

##### Pendapatan

Seluruh penjualan Grup dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, dimana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel VCL. Semua penjualan Grup merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Penjualan kepada VCL	<b>625,429</b>	621,593	Sales to VCL
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")	<b>156,583</b>	155,307	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")
Jumlah	<b>782,012</b>	776,900	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	<b>100%</b>	100%	(Sales to related parties as a percentage of total revenue)

##### Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	<b>1,426</b>	1,974	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan lainnya)	<b>43.66%</b>	25.92%	(As a percentage of total other income)

#### b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Grup.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

### 33. Related party information

The Group is controlled by VCL. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

#### a. Revenue and other income

##### Revenue

The Group's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and VCL's average net realised price for nickel. All of the Group's sales represent transactions with related parties.

Revenue for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of:

##### Other income

Other income from related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of:

#### b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Group.

The compensation paid or payable to the Boards of Commissioners and Directors is shown below:

#### Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019/ For the year ended December 31, 2019

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	<b>0.21%</b>	<b>177.5</b>	<b>3.65%</b>	<b>3,158.3</b>
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	<b>0.24%</b>	<b>204.7</b>
Jumlah/Total	<b>0.21%</b>	<b>177.5</b>	<b>3.89%</b>	<b>3,363.0</b>

\*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

#### Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018/ For the year ended December 31, 2018

(Dalam ribuan Dolar AS)/ (US Dollars, in thousands)	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.25%	215.5	3.94%	3,465.0
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.19%	167.0
Jumlah/Total	0.25%	215.5	4.13%	3,632.0

\*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs



33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

c. Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti

c. Management service, license and royalty fees

Beban untuk jasa manajemen, lisensi dan royalti disajikan sebagai beban usaha (lihat Catatan 25) dalam laba rugi. Berdasarkan perjanjian yang relevan, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor.

Management service, license and royalty fees are presented as operating expenses (refer to Note 25) in profit or loss. Based on the relevant agreement, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross sales proceeds.

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	6,272	6,852	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	45.68%	59.18%	(As a percentage of total operating expenses)

d. Beban lainnya

d. Other costs

Di beban pokok pendapatan

In cost of revenue

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Jasa professional dan tagihan atau beban yang dibayarkan atas nama Perseroan: VCL	3,614	3,913	Professional services and expense reimbursement paid on behalf of the Company: VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.54%	0.58%	(As a percentage of total cost of revenue)

Di biaya keuangan

In finance costs

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya jaminan: Vale S.A.	154	1,006	Guarantee fee: Vale S.A.
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya keuangan)	3.94%	14.82%	(As a percentage of total finance costs)

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 18), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta (nilai penuh) fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran jaminan pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari). Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

In connection with the SEFA (refer to Note 18), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million (full amount) debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first guarantee payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February). The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	71,335	110,750	VCL
SMM	35,960	13,498	SMM
Jumlah	107,295	124,248	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

Pada 30 Juni 2017, Perseroan menerima permintaan dari VCL untuk melanjutkan perpanjangan jangka waktu pembayaran ini untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018. Sebagai kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran, VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 125 basis poin yang dibagi dengan setiap jumlah hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On June 30, 2017, the Company received a request from VCL to continue the extension of the payment term for the period effective on July 1, 2017 until June 30, 2018. As compensation for the extended payment term, VCL will pay interest at an annual rate of two months LIBOR plus 125 basis points prorated for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Pada 3 April 2018, VCL meminta untuk kembali memperpanjang masa berlaku persetujuan perpanjangan jangka waktu pembayaran untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 dan mengajukan perubahan pada skema kompensasi. VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 85 basis poin per tahun untuk setiap hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On April 3, 2018, VCL further asked for extension of the payment term for the period effective on July 1, 2018 until June 30, 2019 and requested changes on the compensation scheme. VCL will pay interest at two months LIBOR plus 85 basis points per annum for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Untuk menjamin perlakuan yang sama di antara para pembeli produk nikel Perseroan, Perseroan telah menawarkan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang sama kepada SMM. Perseroan telah menerima konfirmasi tertulis bahwa SMM tidak akan mengubah jangka waktu pembayaran saat ini yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan tidak memiliki keberatan terhadap transaksi dengan VCL.

To ensure equal treatment between the purchasers of the Company's nickel products, the Company has offered the same extended payment term to SMM. The Company has obtained written confirmation that SMM wishes to maintain the original term under its sales agreement and it has no objection to the VCL transaction.

Perjanjian tidak diperpanjang setelah 30 Juni 2019.

The agreement has not been extended after June 30, 2019.

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar*)	99	-	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	87	61	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Pinjaman kepada personil manajemen kunci*)	186	61	Loans to key management personnel*)
Piutang bunga (Catatan 8 dan 33e.i)	-	639	Interest receivables (Note 8 and 33e.i)
Jumlah	186	700	Total
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(58)	(18)	Less: Non-current portion
Bagian lancar	128	682	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	4.65%	27.00%	(As a percentage of other current financial assets)

\*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 miliar (nilai penuh) per 31 Desember 2019 adalah Agus Superiadi.

\*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion (full amount) as at December 31, 2019 is Agus Superiadi.

Piutang bunga dan bagian lancar dari pinjaman kepada personil manajemen kunci akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Interest receivables and current portion of loans to key management personnel will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci - tidak lancar	58	18	Loans to key management personnel - non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset (piutang usaha (i), aset keuangan lancar lainnya (ii), dan piutang pihak berelasi non-usaha (iii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	107,481	124,948	Total assets (trade receivables (i), other current financial assets (ii), and non-trade receivables from related parties (iii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	4.84%	5.67%	(As a percentage of total assets)

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	2,071	1,620	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	2.13%	1.78%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akruai

ii) Accruals

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	276	1,229	VCL
Vale S.A.	-	192	Vale S.A.
Jumlah	276	1,421	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	1.69%	5.55%	(As a percentage of total accruals)
Jumlah liabilitas (utang usaha (i) dan akrual (ii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	2,347	3,041	Total liabilities (trade payables (i) and accruals (ii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	0.84%	0.95%	(As a percentage of total liabilities)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ Ultimate parent entity	Penjamin dari pinjaman dengan kompensasi biaya jaminan (lihat Catatan 33d)/ Guarantor of loans in return for guarantee fee (refer to Note 33d)
VCL	Perusahaan induk/Parent entity	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti (lihat Catatan 33a, 33c, dan 33d)/ Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees (refer to Notes 33a, 33c, and 33d)
SMM	Pemegang saham/Shareholder	Penjualan barang jadi (lihat Catatan 33a)/ Sale of finished goods (refer to Note 33a)
Manajemen kunci/Key management	Personil manajemen kunci (yaitu Dewan Komisaris dan Direksi)/ Key management personnel (i.e. Board of Commissioners and Board of Directors)	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi (lihat Catatan 33b dan 33e)/ Compensation and remuneration; housing and personal loans (refer to Notes 33b and 33e)

34. Biaya keuangan

34. Finance costs

Rincian biaya keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The components of finance costs for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban akresi (Catatan 28)	2,324	2,615	Accretion expense (Note 28)
Biaya agen dan amortisasi biaya pinjaman (Catatan 18)	996	1,016	Agency fee and amortisation of debt issuance costs (Note 18)
Biaya bunga (Catatan 18)	438	2,152	Interest expense (Note 18)
Biaya jaminan (Catatan 18 dan 33d)	154	1,006	Guarantee fee (Notes 18 and 33d)
Jumlah	3,912	6,789	Total

35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2019 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.897 (31 Desember 2018: IDR14.402).

35. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

As at December 31, 2019 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR13,897 (December 31, 2018: IDR14,402).

31 Desember	2019		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)		
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>	
Kas dan setara kas	IDR	287,013	Cash and cash equivalents	
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	23,152	Other current financial assets	
Pajak dibayar di muka	IDR	1,664,751	Prepaid taxes	
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	806	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	64,245	Other non-current financial assets	
<b>Jumlah aset moneter dalam mata uang asing</b>		<b>146,793</b>	<b>Total monetary assets in foreign currencies</b>	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak ketiga	IDR	(877,339)	Third parties	
Others		(10)		
Akrua	IDR	(165,985)	Accruals	
Utang pajak	IDR	(24,649)	Taxes payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(216,277)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(52,225)	Other current financial liabilities	
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(616,480)	Provision for asset retirement	
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(269,864)	Post-employment benefit liabilities	
<b>Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing</b>		<b>(165,450)</b>	<b>Total monetary liabilities in foreign currencies</b>	
<b>Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing</b>		<b>(18,657)</b>	<b>Net monetary liabilities in foreign currencies</b>	
31 Desember	2018		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)		
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>	
Kas dan setara kas	IDR	152,174	Cash and cash equivalents	
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	26,414	Other current financial assets	
Pajak dibayar di muka	IDR	1,186,515	Prepaid taxes	
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	259	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	90,734	Other non-current financial assets	
<b>Jumlah aset moneter dalam mata uang asing</b>		<b>101,102</b>	<b>Total monetary assets in foreign currencies</b>	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak ketiga	IDR	(702,958)	Third parties	
Others		(10)		
EUR		(4)		
Akrua	IDR	(240,283)	Accruals	
Utang pajak	IDR	(25,661)	Taxes payable	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(227,886)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(18,377)	Other current financial liabilities	
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(544,880)	Provision for asset retirement	
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(214,276)	Post-employment benefit liabilities	
<b>Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing</b>		<b>(151,401)</b>	<b>Total monetary liabilities in foreign currencies</b>	
<b>Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing</b>		<b>(50,299)</b>	<b>Net monetary liabilities in foreign currencies</b>	

**35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS**  
(lanjutan)

Grup tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variable lain konstan, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar AS\$0,6 juta (nilai penuh).

**36. Informasi segmen**

Grup beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Grup dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 33a).

Seluruh penjualan Grup merupakan penjualan nikel kepada pihak-pihak berelasi yang berdomisili di Kanada (VCL) dan Jepang (SMM) (lihat Catatan 33a).

**37. Aset dan liabilitas keuangan**

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan kategori akun:

**35. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars** (continued)

The Group does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and the majority of the Group's expenses are transacted in US Dollars which indirectly represents a natural hedge.

As at December 31, 2019, if the US Dollar had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, pre-tax loss for the year would have been US\$0.6 million (full amount) higher/lower.

**36. Segment information**

The Group operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Group's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 33a).

All of the Group's sales represent nickel sales to related parties domiciled in Canada (VCL) and Japan (SMM) (refer to Note 33a).

**37. Financial assets and liabilities**

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2019	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan/ <i>Financial assets measured at</i>		Nilai wajar diakui pada laba rugi <i>Fair value through</i>	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ <i>Fair value through other comprehensive</i>	December 31, 2019
	Jumlah/ <i>Total</i>	<i>amortised cost</i>	<i>profit or loss</i>	<i>income</i>	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
<b>Aset keuangan:</b>					<b>Financial assets:</b>
Kas dan setara kas	249,035	249,035	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	15,412	15,412	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	107,295	107,295	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,754	2,754	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	58	58	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4,623	4,623	-	-	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>379,177</b>	<b>379,177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total financial assets</b>
31 Desember 2018					December 31, 2018
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
<b>Aset keuangan:</b>					<b>Financial assets:</b>
Kas dan setara kas	301,153	301,153	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	29,952	29,952	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	124,248	124,248	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,526	2,526	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	18	18	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	6,300	6,300	-	-	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>464,197</b>	<b>464,197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total financial assets</b>

37. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

37. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2019	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	December 31, 2019
(US Dollars, in thousands)				
<b>Liabilitas keuangan:</b>				<b>Financial liabilities:</b>
Utang usaha	97,408	-	97,408	Trade payables
Akrual	16,327	-	16,327	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	3,753	-	3,753	Other current financial liabilities
Liabilitas sewa	1,120	-	1,120	Lease liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>118,608</b>	<b>-</b>	<b>118,608</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<hr/>				
(US Dollars, in thousands)				
<b>Liabilitas keuangan:</b>				<b>Financial liabilities:</b>
Utang usaha	91,181	-	91,181	Trade payables
Akrual	25,599	-	25,599	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1,276	-	1,276	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	36,519	-	36,519	Bank borrowings
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>154,575</b>	<b>-</b>	<b>154,575</b>	<b>Total financial liabilities</b>

38. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Grup berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Grup.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

**Manajemen risiko permodalan**

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tanggal 31 Desember 2019, struktur modal Grup didanai oleh ekuitas pemegang saham.

38. Financial risk management

The Group's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risk.

**Capital risk management**

The Group's objective when maintaining capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. As at December 31, 2019, the Group's capital structure is funded by shareholders' equity.

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

**Risiko pasar**

**(i) Risiko nilai tukar**

Penjualan dan mayoritas pengeluaran operasional Grup dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Lihat Catatan 35 untuk rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

**(ii) Risiko harga**

Grup terpengaruh oleh fluktuasi harga nikel, batubara dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh secara negatif oleh harga nikel, batu bara dan bahan bakar, yang bergantung dari tingkat permintaan dan penawaran dunia. Grup mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 15%, dengan semua variabel lain tetap, laba sebelum pajak Grup meningkat/menurun sebesar AS\$16,09 juta (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Grup tidak memiliki instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Grup.

**(iii) Risiko suku Bunga**

Grup menilai risiko suku bunga adalah minimal karena Grup tidak memiliki pembiayaan eksternal pada tanggal 31 Desember 2019. Eksposur tingkat bunga dipantau untuk menjaga risiko yang rendah dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terpengaruh oleh suku bunga.

38. Financial risk management (continued)

**Market risk**

**(i) Foreign exchange risk**

The Group's sales and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to the fluctuations in foreign exchange rates.

Refer to Note 35 for detail of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars.

**(ii) Price risk**

The Group is exposed to fluctuations in nickel, coal and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, coal and fuel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand. The Group actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of price volatility.

For the year ended December 31, 2019, if the average price of nickel had increased/decreased by 15%, with all other variables held constant, the Group's pre-tax profit would have increased/decreased by US\$16.09 million (full amount).

At December 31, 2019 and December 31, 2018, the Group does not have any financial instruments whose value was directly linked to movements of the world nickel price. Therefore, fluctuation of the world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Group's financial instruments.

**(iii) Interest rate risk**

The Group assesses the interest rate risk as minimal since the Group does not have any external financing as at December 31, 2019. Interest rate exposure is monitored to maintain a low risk and to minimise any negative impact to the Group.

The following table presents a breakdown of the Group's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

31 Desember/December 31, 2019

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>			
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	139,035	-	110,000	-	-	249,035	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	15,412	-	15,412	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	-	-	107,295	107,295	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	2,754	2,754	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	58	58	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	4,623	4,623	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>139,035</b>	<b>-</b>	<b>110,000</b>	<b>15,412</b>	<b>114,730</b>	<b>379,177</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang usaha	-	-	-	-	(97,408)	(97,408)	Trade payables
Akrual	-	-	-	-	(16,327)	(16,327)	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(3,753)	(3,753)	Other current financial liabilities
Liabilitas sewa	-	-	(947)	(173)	-	(1,120)	Lease liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(947)</b>	<b>(173)</b>	<b>(117,488)</b>	<b>(118,608)</b>	<b>Total financial liabilities</b>

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

**Risiko pasar** (lanjutan)

**Market risk** (continued)

**(iii) Risiko suku bunga** (lanjutan)

**(iii) Interest rate risk** (continued)

	31 Desember/December 31, 2018						Jumlah/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing			
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year				
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)	
<b>Aset</b>								<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	63,860	-	237,293	-	-	301,153	Cash and cash equivalents	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	14,345	15,607	29,952	Restricted cash	
Piutang usaha	110,750	-	-	-	13,498	124,248	Trade receivables	
Aset keuangan lancar lainnya	639	-	-	-	1,887	2,526	Other current financial assets	
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	18	18	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	6,300	6,300	Other non-current financial assets	
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>175,249</b>	<b>-</b>	<b>237,293</b>	<b>14,345</b>	<b>37,310</b>	<b>464,197</b>	<b>Total financial assets</b>	
<b>Liabilitas</b>								<b>Liabilities</b>
Utang usaha	-	-	-	-	(91,181)	(91,181)	Trade payables	
Akrual	-	-	-	-	(25,599)	(25,599)	Accruals	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(1,276)	(1,276)	Other current financial liabilities	
Pinjaman bank	(36,519)	-	-	-	-	(36,519)	Bank borrowings	
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>(36,519)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(118,056)</b>	<b>(154,575)</b>	<b>Total financial liabilities</b>	

Pada tanggal 31 Desember 2019 perubahan suku bunga sebesar 0,5% dengan semua variabel lain tetap, tidak akan berdampak signifikan terhadap laba tahun berjalan.

As at December 31, 2019, changes in interest rates by 0.5% with all other variables held constant would not have a significant impact to profit for the year.

**Risiko kredit**

**Credit risk**

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel Grup dalam *matte*, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan VCL (induk Perseroan) dan SMM yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Grup hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5).

Credit risk is minimal as the Group's nickel in *matte*, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with VCL (parent company) and SMM, one of the Company's majority shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Group has a policy to select reputable local and overseas banks to minimise credit risk (refer to Note 5).



38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

**Risiko kredit** (lanjutan)

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
<b>Piutang usaha:</b> Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			<b>Trade receivables:</b> Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB- (2018: BBB+)	71,335	110,750	BBB- (2018: BBB+)
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (2018: AA-)	35,960	13,498	AA- (2018: AA-)
<b>Berperingkat</b>	<b>107,295</b>	<b>124,248</b>	<b>Rated</b>

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)

**Kas di bank, deposito berjangka dan kas yang di batasi penggunaannya**

**Moody's**

Aa3 (2018: Aa3)	66,098	113,462
A2 (2018: A2)	38,285	42,797
A1 (2018: A1)	10,000	146,507
Baa2 (2018: Baa2)	63,667	15,339
Ba3 (2018: Ba3)	55,000	-

**Fitch National**

AAA (2018: AAA)	31,397	13,000
-----------------	--------	--------

**Cash in bank, time deposits and restricted cash**

**Moody's**

Aa3 (2018: Aa3)	
A2 (2018: A2)	
A1 (2018: A1)	
Baa2 (2018: Baa2)	
Ba3 (2018: Ba3)	

**Fitch National**

AAA (2018: AAA)	
-----------------	--

<b>Berperingkat</b>	<b>264,447</b>	<b>331,105</b>	<b>Rated</b>
---------------------	----------------	----------------	--------------

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasang profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

38. Financial risk management (continued)

**Credit risk** (continued)

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
<b>Piutang usaha:</b> Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			<b>Trade receivables:</b> Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB- (2018: BBB+)	71,335	110,750	BBB- (2018: BBB+)
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (2018: AA-)	35,960	13,498	AA- (2018: AA-)
<b>Berperingkat</b>	<b>107,295</b>	<b>124,248</b>	<b>Rated</b>

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)

**Cash in bank, time deposits and restricted cash**

**Moody's**

Aa3 (2018: Aa3)	113,462
A2 (2018: A2)	42,797
A1 (2018: A1)	146,507
Baa2 (2018: Baa2)	15,339
Ba3 (2018: Ba3)	-

**Fitch National**

AAA (2018: AAA)	13,000
-----------------	--------

<b>Berperingkat</b>	<b>331,105</b>	<b>Rated</b>
---------------------	----------------	--------------

**Liquidity risk**

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below classifies the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2019	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(97,408)	-	-	-	-	Trade payables
Akrua	(16,327)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,753)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(780)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Liabilitas sewa	(390)	(670)	(120)	-	-	Lease liabilities

31 Desember 2018

December 31, 2018

(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(91,181)	-	-	-	-	Trade payables
Akrua	(25,599)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,276)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(2,042)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(19,792)	(16,727)	-	-	-	Bank borrowing

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2019 and 2018.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi

39. Contingent assets and liabilities

a. Perihal lingkungan hidup

a. Environmental matters

**Kehutanan**

**Forestry**

Berdasarkan KK Perseroan sebagaimana telah diubah dengan KK 2014, Perseroan diberikan semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan pengusahaannya serta semua kewenangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah KK.

Based on the Company's CoW as amended by the 2014 CoW, the Company is granted all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorisations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Kehutanan 1999 diterbitkan. Undang-Undang Kehutanan 1999 secara tegas melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

In 1999, the 1999 Forestry Law was proclaimed. The 1999 Forestry Law expressly prohibits open pit mining in protected forests.

Pada bulan Mei 2004, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mengakui KK Perseroan sebagai salah satu dari 13 perusahaan tambang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung (sampai dengan berakhirnya izin/kontrak). Selanjutnya pada tahun 2008, Perseroan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk seluruh kawasan hutan yang berada di dalam wilayah KK, dengan tetap mencadangkan dan tidak mengurangi hak-hak Perseroan berdasarkan KK.

In May 2004, the President issued a Presidential Decree which recognises the Company's CoW as one of the 13 mining companies permitted to conduct mining activities in protected forest areas (until the end of the permit/contract). Therefore, in 2008, the Company applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated.

Peraturan kehutanan menetapkan kewajiban tertentu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, antara lain untuk melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan Dana Reboisasi, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan dan untuk melakukan perlindungan hutan.

Forestry laws and regulations stipulate certain obligations for lend-use permit holders, among others, to pay Forest Resource Charges ("FRC") and Reforestation Funds, to pay non-tax state revenue, to carry out rehabilitation of watershed area, to carry out empowerment of the community surrounding the lend-use permit area and to conduct forest protection.

Untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran PNBP untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta atau setara dengan AS\$0,03 juta (nilai penuh).

For the period from June 2019 to June 2020, the Company has made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million or equivalent to US\$0.03 million (full amount).

### 39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

##### Kehutanan (lanjutan)

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan, sebagaimana diubah dengan SK No. 5714/Menlhk-PDASHL/KTA/2015. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas izin pinjam pakai Karebbe. Perseroan telah menunjuk kontraktor dan akan mengeluarkan IDR42 juta/ha (nilai penuh) untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini (setara dengan pembayaran AS\$3.086/ha). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini adalah sebesar IDR3,2 miliar atau setara dengan AS\$230 ribu (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Sorowako melalui Keputusan No. SK.645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk membayar PNPB di bidang kehutanan secara retroaktif terhitung mulai tahun 2008 (yaitu tahun diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2008 yang memperkenalkan pengenaan pendapatan negara bukan pajak terkait izin pinjam pakai kawasan hutan). Kewajiban pembayaran secara retroaktif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Perseroan memiliki jangka waktu satu tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran ini. Nilai pembayaran akan didasarkan pada perhitungan Perseroan (*self-assessment*). Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan, Perseroan telah mengakui IDR169 milyar atau setara dengan AS\$11,2 juta (nilai penuh) beban di laporan keuangan tahun 2018 dan telah melakukan pembayaran di tahun 2019 atas PNPB retroaktif untuk tahun 2008 - 2018. Perseroan juga telah melakukan pembayaran sebesar IDR26 milyar atau setara dengan AS\$1,8 juta (nilai penuh) untuk PNPB tahun 2019.

Pada bulan Mei 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Bahodopi melalui Keputusan No. SK.341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

#### Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi

Perseroan menerima izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan KK Perseroan di (i) blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, (ii) blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan (iii) blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena izin pinjam pakai tersebut hanya untuk kegiatan eksplorasi, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran PNPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014.

#### Lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan. Persetujuan AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi, Perseroan mendapatkan Izin Lingkungan pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas.

### 39. Contingent assets and liabilities (continued)

#### a. Environmental matters (continued)

##### Forestry (continued)

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company, as amended by SK No. 5714/Menlhk-PDASHL/KTA/2015. This Decree is issued to determine the watershed forstation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The Company has appointed a contractor and shall incur IDR42 million/ha (full amount) to fulfil this forstation obligation (equivalent to approximately US\$3,086/ha). As of December 31, 2019, the amount incurred by the Company to fulfil the rehabilitation obligation is IDR3.2 billion or equivalent to US\$230 thousand (full amount).

On December 31, 2018 the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Sorowako area by virtue of Decree No. 645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

In addition, the Company is also required to pay the forestry non-tax state revenue retroactively starting from 2008 (i.e. since the issuance date of Government Regulation No. 2/2008 introducing non-tax state revenue related to lend-use permits). This retroactive payment obligation is in accordance with Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 regarding Guidance for Lend Use of Forest Area. The Company has a one-year period to fulfil this payment obligation. The payment amount will be based on a self-assessment basis. Based on the Company's self-assessment, the Company has recognized expense of IDR169 billion or equivalent to US\$11.2 million (full amount) in the 2018 financial statements and has made payments in 2019 for the retroactive forestry non-tax state revenue for the years 2008 - 2018. The Company also made a payment of IDR26 billion or equivalent to US\$1.8 million (full amount) for the forestry non-tax state revenue for the year 2019.

In May 2019, the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Bahodopi area by virtue of Decree No. 341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

#### Lend-use permit for exploration activities

The Company received lend-use permits for exploration activities within the Company's CoW area in (i) the Bahodopi block, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, (ii) the Pomalaa block, Kolaka and East Kolaka Regencies, South East Sulawesi Province and (iii) the Sorowako block, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. Since the above mentioned lend-use permits only cover exploration activities, the Company does not have the obligation to pay the non-tax state revenue as stipulated in Government Regulation No. 33/2014.

#### Environment

Based on Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

The Company has already obtained an approved Environmental Impact Assessment ("AMDAL") from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the CoW area in South Sulawesi. The AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For the Bahodopi Block, the Company obtained its Environmental License in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company obtained AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope.

**39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)**

**a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)**

**Lingkungan hidup (lanjutan)**

Pada bulan Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Izin Lingkungan dan persetujuan atas addendum AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako.

**b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang**

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan seluruh perusahaan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No. 07/2014"). Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya setidaknya 40% dari total saham yang dimiliki. Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi mulai tahun 2015.

Pada tanggal laporan ini, total bank garansi yang ditempatkan oleh Perseroan sebagai jaminan reklamasi sesuai dengan Peraturan Menteri No.07/2014 adalah sebesar AS\$11,2 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako dan AS\$304 ribu (nilai penuh) untuk Blok Pomalaa.

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Jumlah estimasi biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito berjangka mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan.

Perseroan telah menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2017 sampai dengan 2019 dalam bentuk deposito berjangka masing-masing sebesar AS\$1,4 juta (nilai penuh), AS\$3,8 juta (nilai penuh) dan AS\$6,6 juta (nilai penuh).

Dengan diperolehnya Izin Lingkungan dan persetujuan atas perubahan AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako, pada bulan Desember 2018, Perseroan mengajukan perubahan atas rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh KESDM pada tahun 2015. Rencana penutupan tambang ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 (yang mencabut Peraturan Menteri No. 07/2014) dan Keputusan Menteri ESDM No.1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Penambangan yang Baik. Dalam hal perubahan ini disetujui oleh KESDM, maka jaminan penutupan tambang yang telah ditempatkan oleh Perseroan akan disesuaikan kembali.

**c. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan perubahan**

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan ("IUP") pihak ketiga yang tumpang tindih di dalam wilayah KK Perseroan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat terkini dari KESDM, KESDM mengkonfirmasi bahwa tiga dari empat IUP yang tumpang tindih dengan wilayah KK Perseroan telah dinyatakan *non-clean and clear* berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM dan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018 dan telah dinyatakan dicabut/berakhir. Sedangkan satu IUP telah dinyatakan *non-clean and clear*, namun masih menunggu proses pencabutan IUP.

Sementara tidak terdapat tumpang tindih pertambangan di dalam Wilayah KK Perseroan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam bentuk perkebunan dan bangunan konstruksi temporer. Pada saat ini, perubahan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

Untuk mengatasi masalah perubahan di dalam wilayah KK Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan KESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah.

**39. Contingent assets and liabilities (continued)**

**a. Environmental matters (continued)**

**Environment (continued)**

In December 2017, the Ministry of Environment and Forestry issued an Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activities in the Sorowako Block.

**b. Mine reclamation and mine closure**

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the financial statements.

On February 28, 2014, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No. 07/2014"). Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is to be registered on the Indonesia Stock Exchange with a free float of at least 40% of its shares. In order to fulfil the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company adjusted the form of its reclamation guarantee from an accounting reserve to a bank guarantee in 2015.

As at the date of this report, the total bank guarantee placed by the Company as reclamation guarantees in accordance with Ministerial Regulation No.07/2014 is US\$11.2 million (full amount) for Sorowako Block and US\$304 thousand (full amount) for Pomalaa Block.

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total estimated cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in time deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement.

The Company has placed mine closure guarantees for 2017 up to 2019 in the form of time deposits in the amount of US\$1.4 million (full amount), US\$3.8 million (full amount) and US\$6.6 million (full amount), respectively.

With the issuance of the Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activity in the Sorowako Block, in December 2018, the Company submitted a revision to the mine closure plan that was approved by the MEMR in 2015. This mine closure plan was prepared in accordance with MEMR Regulation No. 26/2018 (which revoked Ministerial Regulation No. 07/2014) and MEMR Decree No.1827/K/30/MEM/2018 on Guidance for the Implementation of Good Mining Practices. If the revision is approved, the mine closure guarantee that has been placed by the Company will be adjusted.

**c. Overlapping "Izin Usaha Pertambangan" and encroachment**

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party Mining Business Licences (*Izin Usaha Pertambangan* - "IUP") that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi. Based on a recent letter from the MEMR, the MEMR confirmed that three out of four IUPs that overlapped the Company's CoW area have been declared non-clean and clear based on the Minutes of Reconciliation between the Directorate General of Mineral and Coal of the MEMR and the Central Sulawesi Province dated 15 November 2018 and have been declared revoked or expired. The other IUP has been declared non-clean and clear, however is still awaiting IUP revocation process.

While there is no third party mining overlapping in the Company's CoW area in South Sulawesi and Southeast Sulawesi, there have been some community or individual encroachment in the form of plantations and temporary constructions. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy.

To address the issue of encroachment on the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and Local Governments.

### 39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### d. Amandemen KK

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen KK sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

- Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Renegosiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Di bawah ini adalah ringkasan dari komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

Di Sulawesi Selatan, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako.

Di Sulawesi Tenggara, Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari suatu joint venture, bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Jangka waktu Perseroan untuk memulai kegiatan konstruksi untuk setiap komitmen investasi bergantung pada diterimanya semua perizinan/persetujuan dan dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan. Selain itu, komitmen investasi Sulawesi Tengah dan Tenggara dapat dilakukan secara independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (usaha patungan).

Di tahun 2019, Perseroan mendirikan dua entitas anak sebagai suatu tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (lihat Catatan 1).

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (*sole remedy*) atas hal tersebut adalah pelepasan atas wilayah KK tertentu yang berdampak sebagaimana ditetapkan dalam KK 2014.

#### e. Paket peraturan pertambangan

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan paket peraturan pertambangan baru.

Ketentuan utama dari peraturan-peraturan baru yang berpotensi memiliki dampak terhadap Perseroan di masa depan diuraikan sebagai berikut:

- Divestasi: IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dalam rangka penanaman modal asing tunduk pada kewajiban divestasi sebesar 51%.
- Harga patokan mineral: Pemegang IUP/IUPK wajib berpedoman pada harga patokan mineral dalam menjual logam.

Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir amendemen KK (lihat Catatan 39d), Perseroan merujuk kepada peraturan tersebut di atas hanya jika KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

### 39. Contingent assets and liabilities (continued)

#### d. CoW amendment

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment to the CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The 2014 CoW includes the following principal changes:

- The Company can retain areas required to support its operations. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can apply to continue its operations for two additional periods of ten years, in the form of an operating license, subject to the Government's approval.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Below is a summary of the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

In South Sulawesi, the Company commits to implementing an investment program to expand the ore processing and refining capacity at the Company's facility in Sorowako.

In Southeast Sulawesi, the Company is committed to the development and construction of a processing and refining facility as part of a joint venture, together with supporting infrastructure.

The timeline for the Company to commence construction in respect of each investment undertaking is subject to the Company's receipt of all requisite licenses/approvals and consideration of feasibility and environmental studies. Further, the Central and Southeast Sulawesi undertakings may be undertaken independently or as part of a joint venture.

In 2019, the Company established two subsidiaries as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi Provinces (refer to Note 1).

In the event that the Company does not fulfil the investment commitments as set out above, the remedy of the Government in this respect is the relinquishment of the affected area as defined in the 2014 CoW.

#### e. Mining regulation package

In 2017, the Government issued a package of new mining regulations.

The highlights of the new regulations that may have impacts on the Company in the future are outlined below:

- Divestment: Foreign direct investment IUP/Special Mining Business Licence (*Izin Usaha Pertambangan Khusus* – "IUPK") holders are subject to 51% divestment requirement.
- Benchmark Price: IUP/IUPK holders must use a defined benchmark price as the guidance in selling minerals.

As divestment is one of the CoW amendment items (refer to Note 39d), the Company will refer to the above regulations only if the 2014 CoW is silent on the matter.

### 39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### f. Tuntutan hukum

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999 dan UU Lingkungan Hidup 1997. Salinan resmi putusan MA No. 1279 K/Pid.Sus/2012 tersebut baru diterima oleh Perseroan pada bulan Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5,0 miliar atau setara dengan AS\$351,8 ribu (nilai penuh). Putusan juga menghukum agar beberapa kendaraan Perseroan disita oleh Negara.

Perseroan telah menyerahkan seluruh kendaraan (empat unit), sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung, kepada Kantor Kejaksaan Malili. Pada bulan Maret 2017, Perseroan juga telah melakukan pembayaran denda sebesar IDR5,0 miliar atau setara dengan AS\$351,8 ribu (nilai penuh) kepada Jaksa. Pemenuhan permintaan tersebut bukan merupakan pengakuan terhadap tanggung jawab.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara, akan tetapi Mahkamah Agung justru menghukum Perseroan untuk membayar denda dan menyerahkan kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di atas. Pada bulan Maret 2016 Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut dan mengajukan revisi permohonan PK pada bulan Februari 2017.

Permohonan Peninjauan Kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2017 dan pemberitahuan putusan telah diterima pada akhir 2019. Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak ada temuan terhadap Perusahaan dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap Perusahaan selain penyitaan dari kendaraan dan pembayaran denda, sebagaimana disebutkan di atas.

#### g. Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah

Bank Indonesia ("BI") telah mengeluarkan surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya KK. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian yang telah dilakukan Perseroan kepada BI setiap enam bulan.

#### h. Peraturan ESDM tentang kewajiban tata batas

Pada bulan Oktober 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2015 yang mewajibkan pemegang IUP dan KK untuk melakukan tata batas wilayah. Perseroan, sebagai pemegang KK, memiliki jangka waktu enam bulan untuk melakukan kewajiban tersebut, terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan. Pada bulan April 2018, kewajiban ini diubah melalui peraturan ESDM No. 25/2018. Berdasarkan peraturan yang baru ini, kewajiban untuk melakukan tata batas tidak berlaku bagi seluruh wilayah KK, namun hanya wilayah yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Saat ini, Perseroan belum dapat memenuhi Peraturan ini, mengingat sebagian besar wilayah KK Perseroan berada di dalam kawasan hutan dan Perseroan masih menunggu penetapan areal kerja untuk atas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, Perseroan telah melakukan pemasangan tanda batas pada wilayah non-kawasan hutan secara bertahap dan Perseroan senantiasa menyampaikan laporan kemajuan kepada KESDM.

#### i. Peraturan Pemerintah No. 1/2019

Sebagai implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah ke-XVI, pada 10 Januari 2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1523/2019. Peraturan ini menetapkan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dari Indonesia (termasuk nikel matte). Berdasarkan peraturan di atas, Perseroan wajib untuk menempatkan devisa hasil ekspor melalui rekening khusus pada bank devisa di Indonesia dan hanya dapat dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempertimbangkan bahwa peraturan baru ini memiliki dampak terhadap SEFA antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe, yang berakhir pada bulan Agustus 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan awal atas fasilitas tersebut.

### 39. Contingent assets and liabilities (continued)

#### f. Litigation

In mid December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law. The official copy of Decision No. 1279 K/Pid.Sus/2012 was only received by the Company in October 2016. The decision stated that four former employees of the Company are guilty as charged and, therefore, sentenced to imprisonment of two years; and that the Company is ordered to pay a fine of IDR5.0 billion or equivalent to US\$351.8 thousand (full amount). The decision also ordered that some vehicles of the Company are to be seized by the State.

The Company has delivered all vehicles (four units), as stated in the Supreme Court Decision, to the Malili Prosecutor Offices. In March 2017, the Company also paid the IDR5.0 billion or equivalent to US\$351.8 thousand (full amount) fine to the Prosecutor. The Company's fulfillment of the request is not an admission of liability.

In fact, the Company has neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, yet the Supreme Court punished the Company to pay a fine and surrender the above mentioned vehicles. In March 2016 the Company submitted a Reconsideration against the Supreme Court decision and submitted a revised application for Reconsideration in February 2017.

The Reconsideration application has been rejected in August 2017 and the notice of the decision has been received at the end of 2019. Up to December 31, 2019, there are no findings against the Company and no penalties imposed against the Company other than the confiscation of vehicles and payment of a fine, referred to above.

#### g. Bank Indonesia regulation on obligation to use Rupiah

Bank Indonesia ("BI") has issued letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using a currency other than Rupiah in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use Rupiah and to provide BI with a report on the adjustments the Company has made every six months.

#### h. MEMR regulation on boundary markings

In October 2015, the MEMR issued Regulation No. 33/2015 which imposes the obligation for IUP and CoW holders to establish geographic boundary markings. The Company, as a CoW holder, has six months to comply with the Regulation from the date of promulgation. In April 2018, this obligation was revised by MEMR regulation No. 25/2018. Based on this new regulation, the obligation to establish geographic boundary markings does not apply to the whole CoW area, but only to areas which fulfill the stipulated criteria.

At present, the Company is not able to fully comply with the Regulation, considering the majority of the Company's CoW area is located inside forest areas and the Company is still awaiting the issuance of the working area determination for the forestry land-use permits for production operation activities from the Ministry of Environment and Forestry. However, the Company has started to gradually establish the boundary marking in the non-forestry area and the Company reports the progress to the MEMR.

#### i. Government Regulation No. 1/2019

As an implementation of the Government's 16th Economic Policy Package, on January 10, 2019, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities, as further implemented under Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 and Minister of Finance Decree No. 1523/2019. This regulation sets out the arrangements for the deposit and use of proceeds from the export of natural resources from Indonesia. Based on the above regulations, the Company's export proceeds must now be parked onshore within a specific account maintained with a foreign exchange bank in Indonesia and can only be sent offshore for specific purposes. Considering that this new regulation will impact the SEFA between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project, which was to expire in August 2019, the Company made early repayment of the facility.

**39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)**

**j. Peraturan ESDM No. 11/2019**

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya, pemegang IUP dapat melakukan penjualan bijih nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan persyaratan tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan baru ini: (i) rekomendasi ekspor bijih nikel yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan baru akan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi tersebut berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019, dan (ii) rekomendasi yang diberikan setelah diundangkannya peraturan baru ini hanya akan berlaku efektif sampai 31 Desember 2019. Peraturan ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap Perseroan mengingat Perseroan tidak melakukan penjualan bijih nikel ke luar negeri. Namun, peraturan ini dapat berdampak pada pasar nikel.

**k. Amandemen terhadap Perjanjian Penjualan**

Pada tanggal 20 November 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian *Offtake* (Pembelian dan Pengambilan) yang Diubah dan Dinyatakan Kembali dengan Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. untuk penjualan produk Perseroan dari Sorowako. Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari KESDM pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan akan mulai mengimplementasikan ketentuan-ketentuan baru berdasarkan Perjanjian *Offtake* (Pembelian dan Pengambilan) yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tersebut.

**40. Informasi tambahan untuk laporan arus kas**

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang dan akrual	29,785	29,978	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables and accruals
Penambahan/(pembalikan) aset tetap dari provisi penghentian pengoperasian aset	2,606	(27,841)	Addition/(reversal) of fixed assets from provision for asset retirement

**41. Informasi komparatif**

Beberapa akun di dalam informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

**39. Contingent assets and liabilities (continued)**

**j. MEMR Regulation No. 11/2019**

On August 28, 2019, the MEMR issued Regulation No. 11 of 2019 on the Second Amendment to MEMR Regulation No. 25 of 2018 on Mining Activities of Mineral and Coal. Previously, IUP holders may export nickel ore with <1.7% Ni content in a certain amount under certain conditions. With the issuance of this new regulation: (i) any ore export recommendation which has been issued before the new regulation becomes effective will remain effective until the expiry of the recommendation or, at the latest, until December 31, 2019, and (ii) any recommendation that will be issued after the new regulation was issued will remain effective until December 31, 2019 only. This regulation will become effective on January 1, 2020.

This regulation does not have direct impact to the Company as the Company does not export any nickel ore. However, this regulation may impact the nickel market.

**k. Amendment to the Sales Agreement**

On November 20, 2019, the Company signed Amended and Restated Sales Agreements with Vale Canada limited and Sumitomo Metal Mining Co. Ltd for the sales of the Company's products from Sorowako. The agreements were approved by the MEMR on December 31, 2019. With this approval, starting January 1, 2020, the Company will start to implement the new terms under the Amended and Restated Sales Agreements.

**40. Supplementary information for statements of cash flows**

Significant activities not affecting cash flows:

**41. Comparative information**

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the current period presentation of consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2019.

	31 Desember/December 31, 2019			
	Disajikan sebelumnya/ <i>Previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)		
Pendapatan lainnya	5,641	1,974	7,615	Other income
Beban lainnya	(13,210)	(1,974)	(15,184)	Other expenses

**42. Peristiwa setelah tanggal neraca**

**a. Anggota komite audit**

Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan Felia Salim sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang**

Pada Januari 2020, Perseroan menempatkan bank garansi baru sebagai jaminan reklamasi untuk tahun 2016-2020 sesuai dengan Peraturan Menteri No.07/2014 sebesar AS\$16 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako dan AS\$300 ribu (nilai penuh) untuk Blok Pomalaa. Perseroan juga menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2020 dalam bentuk deposito berjangka sebesar AS\$11,4 (nilai penuh).

**42. Subsequent events**

**a. Audit committee member**

The Board of Commissioners of the Company has approved the appointment of Felia Salim as the new member of the Audit Committee effective from January 1, 2020 until December 31, 2021.

**b. Mine reclamation and mine closure**

In January 2020, the Company placed new bank guarantees as reclamation guarantees for the period of 2016-2020 in accordance with Ministerial Regulation No.07/2014 in the amount of US\$16 million (full amount) for Sorowako Block and US\$300 thousand (full amount) for Pomalaa Block. The Company also placed a mine closure guarantee for 2020 in the form of a time deposit in the amount of US\$11.4 million (full amount).